



Katalog : 9204.74

P

D

R

B

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI SULAWESI TENGGARA

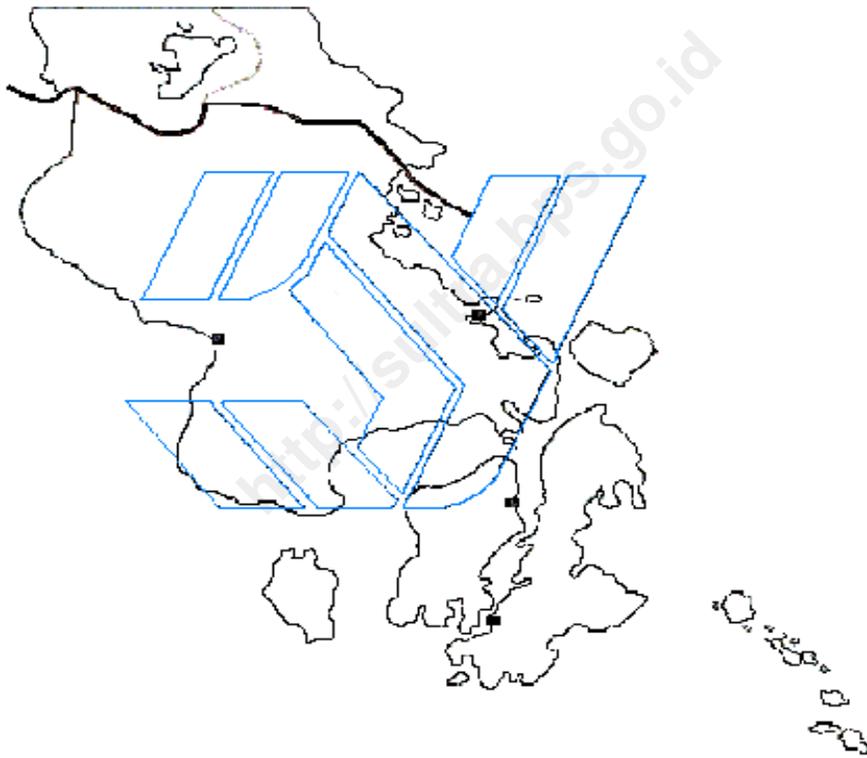
2005 - 2009



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI SULAWESI TENGGARA

2005 - 2009



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT
SULAWESI TENGGARA
2005 - 2009

ISSN : 0854-9303
Nomor Publikasi : 74551-10-01
Nomor Katalog : 9210.74
Ukuran Buku : 28 x 21 cm
Jumlah Halaman : 104 halaman

Naskah :

Seksi Neraca Produksi

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit :

Seksi Neraca Produksi

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan oleh :

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Tenggara 2005-2009 merupakan lanjutan publikasi sejenis tahun sebelumnya yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara.

Publikasi ini memuat tinjauan mengenai perkembangan perekonomian Sulawesi Tenggara yang disajikan secara deskriptif. Disamping itu disajikan pula angka-angka PDRB tahun 2005-2009 baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000. Untuk melengkapi publikasi ini disajikan pula konsep dan definisi, ruang lingkup dan metode penghitungan serta penjelasan PDRB menurut lapangan usaha tahun 2009.

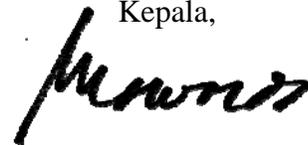
Penyajian publikasi PDRB 2005-2009, menggunakan tahun dasar 2000 dalam penghitungannya dan ini berlaku serentak di seluruh Indonesia. Beberapa angka yang disajikan masih bersifat sementara, karena belum tersedianya data final secara lengkap, dan akan disempurnakan pada penerbitan selanjutnya. Kepada pemakai data dianjurkan untuk memperhatikan perubahan yang ada, dan dianjurkan untuk menggunakan data terbitan terakhir.

Kepada semua pihak yang telah memberi bantuan sehingga terwujudnya publikasi ini diucapkan terima kasih. Akhirnya segala kritik dan saran dari pemakai data sangat diharapkan demi penyempurnaan publikasi ini di masa datang dan semoga publikasi ini bermanfaat.

Kendari, Juli 2010

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI
SULAWESI TENGGARA

Kepala,



Drs. Mawardi Arsyad, M. Si.
NIP. 19560727 197903 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
I. PENDAHULUAN	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Kerangka Dasar Ekonomi Regional	3
1.3. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto	4
1.4. Tujuan dan Kegunaan Data Produk Domestik Regional Bruto	6
1.5. Cara Penyajian Angka Indeks	8
1.6. Penghitungan Seri Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000	9
1.7. Perubahan Tahun Dasar	11
II. TINJAUAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO SULAWESI TENGGARA	16
2.1. Struktur Ekonomi	16
2.2. Pertumbuhan Ekonomi Regional	18
2.3. PDRB Per Kapita	20
III. PERKEMBANGAN EKONOMI SEKTORAL DAN PERANANNYA	23
3.1. Pertanian	23
3.2. Pertambangan dan Penggalan	25

3.3.	Industri Pengolahan	28
3.4.	Listrik dan Air Bersih	31
3.5.	Bangunan	33
3.6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	35
3.7.	Pengangkutan dan Komunikasi	38
3.8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	41
3.9.	Jasa-Jasa	44
IV.	LAMPIRAN-LAMPIRAN	48
4.1.	Ruang Lingkup dan Metode Penghitungan.....	48
4.2.	Istilah Penting	69
4.3.	Tabel-tabel Pokok PDRB	74

DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
1.	Struktur Perekonomian Nasional dan Sulawesi Tenggara, Atas Dasar Harga Berlaku, 1993 dan 2000 (%)	13
2.	Peranan Sektor Ekonomi dalam PDRB Sulawesi Tenggara Atas Dasar Harga Berlaku, 2005 - 2009(%)	17
3.	Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Sulawesi Tenggara, 2005 - 2009(%)	18
4.	PDRB Per Kapita Sulawesi Tenggara, 2005 - 2009(Rp.)	20
5.	Pertumbuhan Sektor Pertanian Sulawesi Tenggara, 2005 - 2009(%)	24
6.	Peranan Sektor Pertanian terhadap PDRB Sulawesi Tenggara Atas Dasar Harga Berlaku, 2005 - 2009(%)	25
7.	Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian Sulawesi Tenggara Atas Dasar Harga Konstan 2000, 2005 - 2009(%)	26
8.	Peranan Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Sulawesi Tenggara Atas Dasar Harga Berlaku, 2005 - 2009(%)	27
9.	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan tanpa Migas Sulawesi Tenggara Atas Dasar Harga Konstan 2000, 2005 - 2009(%)	28
10.	Peranan Sektor Industri Pengolahan tanpa Migas terhadap PDRB Sulawesi Tenggara Atas Dasar Harga Berlaku, 2005 - 2009(%)	29
11.	Pertumbuhan Sektor Listrik dan Air Bersih Sulawesi Tenggara Atas Dasar Harga Konstan 2000, 2005 - 2009.....	31
12.	Peranan Sektor Listrik dan Air Bersih terhadap PDRB Sulawesi Tenggara Atas Dasar Harga Berlaku, 2005 - 2009.....	32

13.	Pertumbuhan Sektor Bangunan Sulawesi Tenggara Atas Dasar Harga Konstan 2000, 2005 - 2009.....	34
14.	Peranan Sektor Bangunan terhadap PDRB Sulawesi Tenggara Atas Dasar Harga Berlaku, 2005 - 2009.....	35
15.	Pertumbuhan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Sulawesi Tenggara Atas Dasar Harga Konstan 2000, 2005 - 2009.....	36
16.	Peranan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran terhadap PDRB Sulawesi Tenggara Atas Dasar Harga Berlaku, 2005 - 2009.....	37
17.	Pertumbuhan Sektor Angkutan dan Komunikasi Sulawesi Tenggara, 2005 - 2009(%)	39
18.	Peranan Sektor Angkutan dan Komunikasi terhadap PDRB Sulawesi Tenggara, 2005 - 2009(%)	40
19.	Pertumbuhan Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Sulawesi Tenggara, 2005 - 2009(%)	42
20.	Peranan Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan terhadap PDRB Sulawesi Tenggara, 2005 - 2009(%)	43
21.	Pertumbuhan Sektor Jasa-Jasa Sulawesi Tenggara, 2005 - 2009(%)	44
22.	Peranan Sektor Jasa-Jasa terhadap PDRB Sulawesi Tenggara, 2005 - 2009(%)	45

DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
1.	Arus Lingkar Perekonomian	3
2.	Struktur Perekonomian Sulawesi Tenggara Tahun 1993 – 2000	14
3.	Peranan Sektor Ekonomi dalam PDRB Sulawesi Tenggara Atas Dasar Harga Berlaku, 2009	17
4.	Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Sulawesi Tenggara, 2009	19
5.	PDRB Per kapita Sulawesi Tenggara, 2005 - 2009(Ribu Rp.)	21
6.	Peranan Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Sulawesi Tenggara, 2000 dan 2009	27
7.	Peranan Sektor Industri Pengolahan tanpa Migas Sulawesi Tenggara, 2000 dan 2009	30
8.	Peranan Sektor Listrik dan Air Bersih terhadap PDRB Sulawesi Tenggara, 2000 dan 2009	33
9.	Peranan Sektor Bangunan terhadap PDRB Sulawesi Tenggara, 2000 – 2009 (%).....	35
10.	Peranan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran terhadap PDRB Sulawesi Tenggara, 2000 dan 2009	38
11.	Peranan Sektor Angkutan dan Komunikasi terhadap PDRB Sulawesi Tenggara, 2000 dan 2009	41
12.	Peranan Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan terhadap PDRB Sulawesi Tenggara, 2000 dan 2009	43
13.	Peranan Sektor Jasa-jasa terhadap PDRB Sulawesi Tenggara, 2000 dan 2009	46

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Ruang Lingkup dan Metode Penghitungan	48
Istilah Penting	69
Tabel	
1. PDRB Sulawesi Tenggara menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku, 2005 - 2009(Juta Rp.)	74
2. PDRB Sulawesi Tenggara menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000, 2005 - 2009(Juta Rp.)	76
3. Distribusi PDRB Sulawesi Tenggara menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku, 2005 - 2009(%)	78
4. Distribusi PDRB Sulawesi Tenggara menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000, 2005 - 2009(%)	80
5. Indeks Perkembangan PDRB Sulawesi Tenggara menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku, 2005 - 2009(2000 = 100,00)	82
6. Indeks Perkembangan PDRB Sulawesi Tenggara menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000, 2005 - 2009(2000 = 100,00)	84
7. PDRB Per Kapita Sulawesi Tenggara, 2005 - 2009.....	86
8. Indeks Perkembangan PDRB Per Kapita Sulawesi Tenggara, 2005 - 2009(2000 = 100,00)	88
9. Indeks Berantai PDRB Sulawesi Tenggara menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku, 2005 - 2009.....	90
10. Indeks Berantai PDRB Sulawesi Tenggara menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan, 2005 - 2009.....	92
11. Indeks Implisit PDRB Sulawesi Tenggara menurut Lapangan Usaha, 2005 - 2009.....	94

1

Pendahuluan



Latar Belakang



Kerangka Dasar Ekonomi Regional



Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)



Tujuan dan Kegunaan Data Produk Domestik Regional Bruto



Cara Penyajian Angka Indeks



Penghitungan Seri Produk Domestik Regional Bruto ADH Konstan 2000



Perubahan Tahun Dasar

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perekonomian Indonesia sejak tahun 2001 hingga 2009 memperlihatkan pertumbuhan yang terus meningkat dari tahun ke tahun dengan besaran positif, demikian pula yang terjadi terhadap perekonomian domestik Sulawesi Tenggara. Proses pemulihan ekonomi yang sempat melemah pada tahun 2008 dengan pertumbuhan 7,27 persen akibat krisis global, telah nampak pada tahun 2009 dengan pertumbuhan 7,57 persen. Krisis global yang terjadi dipenghujung tahun 2008 tidak berpengaruh signifikan terhadap perekonomian Sulawesi Tenggara, hanya sub sektor pertambangan yang terpengaruh langsung dimana pada dua tahun terakhir mengalami pertumbuhan negatif.

Perubahan struktur ekonomi era pasca krisis ekonomi dan pola konsumsi masyarakat yang semakin beraneka ragam mempengaruhi metode perhitungan PDRB. Perekonomian Indonesia pada tahun 2000 dipandang relatif stabil, untuk itu pemutakhiran tahun dasar penghitungan PDRB dari tahun 1993 beralih ke tahun 2000 agar hasil penghitungan maupun estimasi PDRB sektoral/ penggunaan akan menjadi realistis, dalam arti mampu memberikan gambaran yang lebih baik terhadap fenomena pergeseran struktur produksi lintas sektor.

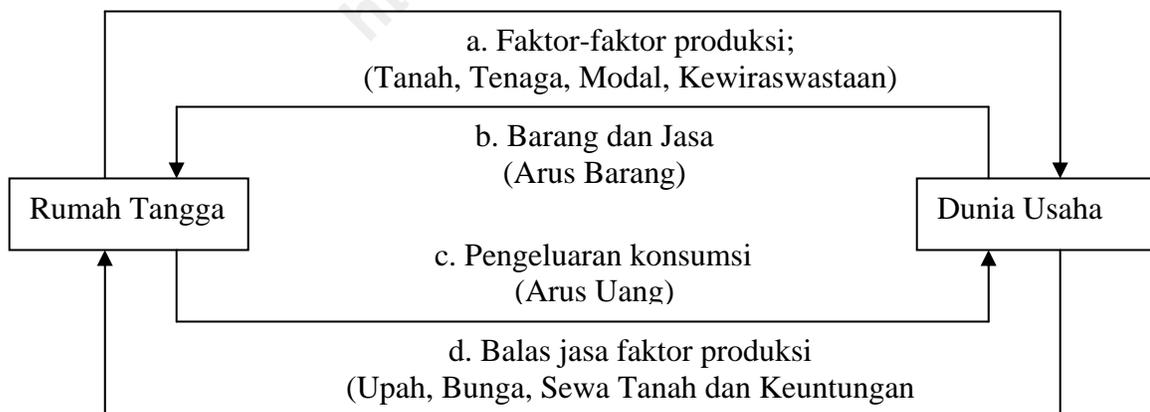
Dengan kondisi itu dapat dinyatakan bahwa bertolak dari kenyataan serta berdasarkan rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar besaran angka PDB/ PDRB dapat saling diperbandingkan antar negara dan antar waktu guna keperluan analisis kinerja perekonomian, baik perekonomian dunia, Indonesia maupun Sulawesi Tenggara. Oleh sebab itu, maka dalam penghitungan dan penyajian angka PDRB Sulawesi Tenggara mulai tahun 2000 sampai saat ini menggunakan tahun dasar 2000.

1.2. Kerangka Dasar Ekonomi Regional

Transaksi ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, secara sederhana dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar yaitu : kelompok produsen dan kelompok konsumen. Kelompok produsen menggunakan faktor produksi yang berasal dari kelompok konsumen dan digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Kelompok konsumen memiliki faktor produksi : tanah, tenaga, modal dan kewiraswastaan yang diberikan pada perusahaan dan menerima balas jasanya berupa sewa tanah, upah dan gaji, bunga modal dan keuntungan. Balas jasa yang diterima ini disebut nilai tambah, yang selanjutnya digunakan oleh konsumen untuk membeli barang dan jasa dari produsen untuk dikonsumsi.

Transaksi dari kedua kelompok ini yang satu merupakan pemakai barang dan jasa, dan yang lain merupakan produsennya berkesinambungan sehingga membentuk siklus perekonomian. Untuk melihat perputaran perekonomian yang sederhana antara kelompok perusahaan dan kelompok rumah tangga di dalam suatu perekonomian yang tertutup atau di dalam suatu daerah yang tidak melaksanakan transaksi dengan daerah lain, dapat digambarkan melalui Gambar 1.

Gambar 1. Arus Lingkar Perekonomian



Keterangan : a) menunjukkan arus penyediaan faktor produksi;
 b) menunjukkan arus balas jasa faktor produksi;
 c) menunjukkan arus uang, yang dikeluarkan konsumen untuk konsumsi
 d) menunjukkan arus barang dan jasa yang dibeli konsumen

Gambar yang sederhana tersebut menunjukkan bahwa aliran barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan akan sama dengan aliran uang yang diterima oleh rumah tangga, dan juga sama dengan besarnya nilai uang yang dibelanjakan oleh rumah tangga.

1.3. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu wilayah tertentu. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun yang bersangkutan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung dengan menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai dasar, dimana dalam penghitungan ini menggunakan tahun 2000. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan harga konstan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi riil dari tahun ke tahun.

Untuk menghitung angka-angka PDRB ada tiga pendekatan yang digunakan, yaitu :

a. *Pendekatan Produksi,*

PDRB adalah jumlah nilai tambah yaitu output dikurangi biaya antara, dari barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara atau daerah tertentu dalam jangka waktu tertentu pula yang biasanya satu tahun. Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) lapangan usaha yaitu :

1. Pertanian,
2. Pertambangan dan Penggalian,
3. Industri Pengolahan,
4. Listrik dan Air Bersih,

5. Bangunan
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran,
7. Pengangkutan dan Komunikasi,
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan,
9. Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah.

b. Pendekatan Pendapatan,

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara atau daerah dalam jangka waktu tertentu yang biasanya satu tahun. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan yang semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak tak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jumlah semua komponen pendapatan ini per sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor (lapangan usaha).

c. Pendekatan Pengeluaran,

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir seperti :

- (1) Pengeluaran konsumsi rumahtangga dan lembaga swasta nirlaba,
- (2) Konsumsi pemerintah,
- (3) Pembentukan modal tetap bruto,
- (4) Perubahan stok, dan
- (5) Ekspor neto, dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor.

Secara konsep, ketiga pendekatan tersebut memberikan jumlah yang sama antara jumlah pengeluaran dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan, dan harus sama

pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksinya. Selanjutnya PDRB atas dasar harga pasar masih mencakup komponen pajak tidak langsung neto.

Disamping sebagai salah satu indikator ekonomi, beberapa ukuran penting lainnya yang bisa diturunkan dari data PDRB yakni :

1. **Produk Regional Bruto** adalah PDRB ditambah dengan pendapatan dari faktor produksi (tenaga kerja dan modal) milik penduduk Sulawesi Tenggara yang diterima dari luar Sulawesi Tenggara dikurangi dengan pendapatan serupa milik penduduk asing yang diperoleh dari Sulawesi Tenggara.
2. **Produk Regional Neto** adalah PDRB dikurangi dengan seluruh penyusutan atas barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama setahun.
3. **Produk Regional atas dasar biaya faktor produksi** adalah Produk Domestik Regional Neto atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung neto. Pajak tidak langsung neto merupakan pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah dikurangi subsidi pemerintah. Baik pajak tidak langsung maupun subsidi, kedua-duanya dikenakan terhadap barang dan jasa yang diproduksi atau dijual. Pajak tidak langsung bersifat menaikkan harga jual sedangkan subsidi sebaliknya. Selanjutnya, Produk Regional Neto atas dasar biaya faktor produksi disebut sebagai Pendapatan Regional.
4. **Angka-angka per kapita** adalah ukuran-ukuran indikator ekonomi sebagaimana diuraikan di atas dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Data Produk Domestik Regional Bruto

Perencanaan ekonomi suatu negara atau daerah umumnya bertujuan untuk mencapai dua hal pokok, yaitu :

1. Mengusahakan agar pembangunan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara nyata, dan
2. Mengusahakan agar pendapatan tersebut dapat terbagi atau diterima masyarakat secara lebih adil.

Untuk mengetahui hal tersebut secara kuantitatif diperlukan berbagai data statistik, antara lain data PDRB, yang merupakan ukuran jumlah balas jasa atas keikutsertaan seluruh faktor produksi dalam proses produksi barang/jasa di suatu wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dengan tersedianya data Produk Domestik Regional Bruto secara berkala dapat diketahui hal-hal berikut :

a. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Apabila angka-angka PDRB disajikan atas dasar harga konstan akan menunjukkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau daerah, baik secara menyeluruh ataupun menurut sektor ekonomi.

b. Tingkat Kemakmuran Suatu Daerah

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum menjamin kemakmuran yang tinggi bagi masyarakat umum, apabila diikuti tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi pula. Tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita lebih menunjukkan perkembangan kemakmuran, sebab apabila dilihat dari sudut konsumsi berarti masyarakat akan mempunyai kesempatan untuk menikmati barang dan jasa dalam takaran yang lebih banyak atau lebih tinggi kualitasnya. Untuk mengetahui tingkat kemakmuran secara relatif, diperlukan data pembandingan dengan daerah lain, sedangkan untuk mengetahui perkembangannya diperlukan data statistik serupa secara berkala.

c. Tingkat Inflasi dan Deflasi

Salah satu masalah pokok yang selalu dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat adalah tingkat inflasi yang cenderung selalu tinggi. Peningkatan pendapatan masyarakat secara nominal akan berkurang artinya apabila diikuti oleh tingkat inflasi yang tinggi, karena bila faktor inflasi diperhitungkan belum tentu terjadi peningkatan secara riil. Tingkat inflasi yang tinggi secara umum

akan menurunkan daya beli masyarakat yang berpenghasilan nominal tetap. Penyajian PDRB atas dasar harga konstan bersama-sama dengan atas dasar harga berlaku dapat dipakai sebagai indikator untuk melihat tingkat inflasi atau deflasi yang terjadi.

d. Gambaran Struktur Perekonomian

Angka-angka yang disajikan menurut sektor ekonomi dapat memperlihatkan struktur perekonomian suatu daerah. Berdasarkan angka masing-masing sektor dapat dilihat peranan atau sumbangan sektor tersebut terhadap jumlah pendapatan secara keseluruhan. Selain itu, melalui penghitungan PDRB dapat dilihat konsistensi berbagai macam data dan hal ini bermanfaat dalam usaha ke arah perbaikan perstatistikan. Makin lengkap dan makin baik kualitas data yang disajikan makin baik pula angka PDRB yang disajikan dalam arti dapat memenuhi harapan.

1.5. Cara Penyajian Angka Indeks

Agregat pendapatan seperti yang telah diuraikan di atas, secara berkala selalu disajikan dalam dua bentuk yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan suatu tahun dasar, yang masing-masing dapat dibedakan seperti berikut ini :

- a. Pada penyajian atas dasar harga berlaku, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga berlaku pada masing-masing tahun, baik pada saat menilai produksi, biaya antara maupun pada penilaian komponen nilai tambah PDRB.
- b. Pada penyajian atas dasar harga konstan suatu tahun dasar, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga tetap pada tahun dasar. Karena menggunakan harga konstan, maka perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan satuan output komoditas yang riil dan bukan karena kenaikan/penurunan harga. Saat ini tahun dasar yang dipakai adalah tahun dasar 2000.

Perubahan agregat pendapatan disajikan dalam bentuk angka indeks, seperti indeks perkembangan, indeks berantai dan indeks implisit yang masing-masing dapat dijelaskan berikut ini :

- a. Indeks Perkembangan,** diperoleh dengan membagi nilai-nilai masing-masing tahun dengan nilai pada tahun dasar dikalikan seratus. Indeks ini menunjukkan tingkat perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun terhadap tahun dasar.
- b. Indeks Berantai,** diperoleh dengan membagi nilai pada masing-masing tahun dengan nilai pada tahun sebelumnya dikalikan seratus. Jadi angka tahun sebelumnya selalu dianggap 100 (seratus). Indeks ini menunjukkan tingkat pertumbuhan agregat pendapatan untuk masing-masing tahun dibandingkan tahun sebelumnya.
- c. Indeks Implisit,** diperoleh dengan membagi nilai atas dasar harga berlaku dengan nilai atas dasar harga konstan untuk masing-masing tahun, dikalikan 100 (seratus). Indeks ini menunjukkan tingkat perkembangan harga dari agregat pendapatan terhadap harga pada tahun dasar. Selanjutnya bila dari indeks implisit ini dibuat indeks berantai, akan terlihat tingkat perkembangan harga barang dan jasa setiap tahun terhadap tahun sebelumnya.

1.6. Penghitungan Seri Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

Seperti telah diuraikan sebelumnya, penghitungan seri Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 sangat penting untuk melihat pertumbuhan riil dari tahun ke tahun dari agregat ekonomi yang diamati. Agregat yang dimaksud tersebut dapat merupakan PDRB secara keseluruhan ataupun nilai tambah sektoral PDRB.

Pada umumnya dikenal empat cara untuk dapat memperoleh nilai tambah sektoral atas dasar harga konstan, yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

1.5.1. Revaluasi

Ini dilakukan dengan menilai produksi dan biaya antara setiap komoditi dimasing-masing tahun dengan tingkat harga pada tahun dasar 2000 dan hasilnya merupakan output, biaya antara atas dasar harga konstan 2000. Selanjutnya nilai tambah bruto atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil selisih antara output dan biaya antara hasil penghitungan tersebut.

Dalam prakteknya, sangat sulit melakukan revaluasi terhadap biaya antara yang digunakan, karena cakupan komponen input yang terlalu banyak, disamping kelengkapan data harga yang belum memadai. Oleh karena itu biaya antara atas dasar harga konstan biasanya diperoleh dari perkalian antara output masing-masing tahun dengan ratio tetap biaya antara terhadap output pada tahun dasar.

1.5.2. Ekstrapolasi

Nilai tambah pada masing-masing tahun atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara mengalikan nilai tambah pada tahun dasar 2000 dengan sebuah ekstrapolator misalnya indeks produksi. Berbagai ekstrapolator seperti indeks masing-masing output yang dihasilkan ataupun indeks dari berbagai indikator produksi seperti jumlah tenaga kerja, jumlah perusahaan dan lainnya, yang dianggap cocok dengan jenis kegiatan yang dihitung, dapat digunakan.

Ekstrapolasi dapat juga dilakukan terhadap perhitungan output atas dasar harga konstan, kemudian dengan menggunakan ratio tetap biaya antara atas dasar harga konstan, nilai tambah atas dasar harga konstan bisa dihitung.

1.5.3. Deflasi

Nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara membagi nilai tambah atas dasar harga berlaku masing-masing tahun dengan indeks harga masing-masing tahun. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator biasanya

merupakan Indeks Harga Konsumen (IHK), Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) dan sebagainya.

1.5.4. Deflasi Berganda

Dengan cara ini, yang dideflasi adalah output dan biaya antaranya sekaligus, sedangkan nilai tambah diperoleh dari selisih output dan biaya antara hasil proses deflasi berganda itu. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator untuk perhitungan output atas dasar harga konstan biasanya merupakan Indeks Harga Produsen atau Indeks Harga Perdagangan Besar sesuai dengan cakupan komoditasnya, sedangkan indeks harga untuk biaya antara adalah indeks harga dari komponen nilai biaya antara terbesar.

Pada kenyataannya sangat sulit melakukan deflasi terhadap biaya antara, disamping karena komponennya terlalu banyak juga karena indeks harganya belum tersedia secara lengkap. Oleh karena itu dalam penghitungan harga konstan, deflasi berganda ini belum banyak dipakai.

1.7. Perubahan Tahun Dasar

Tahun dasar merupakan satu konsep penting yang secara spesifik digunakan untuk menghitung PDB atau PDRB. Konsep ini digunakan untuk menghitung PDB / PDRB, baik dari sisi produksi (sektoral) maupun sisi penggunaan (penerimaan). Dari pendekatan ini dapat diturunkan estimasi PDB / PDRB atas dasar harga konstan (adhk) yang menggambarkan perubahan nilai PDB / PDRB yang hanya dipengaruhi oleh perubahan volume atau kuantum. Secara total, estimasi PDB / PDRB tersebut menggambarkan perubahan ekonomi secara nyata (riil) disuatu daerah atau wilayah.

Dalam rekomendasi yang dibuat oleh PBB dijelaskan bahwa tahun dasar yang digunakan dalam PDB/ PDRB seharusnya selalu diperbaharui (*up-date*) mengikuti perkembangan ekonomi yang terjadi. Idealnya perubahan tahun dasar ini dilakukan setiap 5 atau 10 tahun sekali yang dilakukan melalui proses "*Rebasing*". Secara sederhana

“*Rebasing*” ini diartikan sebagai suatu proses penetapan kembali tahun dasar yang dipakai dalam menghitung PDB/ PDRB.

Lebih jauh dalam panduan yang disusun oleh PBB tersebut dikatakan bahwa agar seluruh negara berupaya untuk memperbaharui tatacara serta teknik penghitungan PDB/ PDRB dengan menggunakan tahun dasar yang dianggap lebih “*up to-date*” dengan menggunakan kaidah-kaidah yang terkini, sehingga informasi yang dihasilkan akan selalu relevan dan mampu menjelaskan perubahan atau fenomena ekonomi yang terjadi. Dengan dasar tersebut maka dipandang perlu untuk merubah tahun dasar dalam penghitungan PDB/ PDRB yang selanjutnya digunakan sebagai tahun rujukan (*reference year*).

Tahun dasar merupakan salah satu tahun yang ditetapkan sebagai dasar waktu rujukan bagi penghitungan PDB/ PDRB. Berawal dari titik waktu tersebut seluruh perkembangan dan pertumbuhan kinerja ekonomi akan diukur. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penetapan tahun dasar merupakan suatu langkah penting dan strategis bagi terwujudnya kualitas data PDB/ PDRB yang lebih baik khususnya untuk tahun-tahun setelah tahun dasar. Ketidaktepatan dalam penentuan tahun dasar akan berakibat buruk terhadap mutu data PDB/ PDRB.

Untuk Indonesia, tahun dasar baru yang ditetapkan adalah tahun 2000. Alasan yang melatarbelakangi penentuan tahun tersebut adalah sebagai berikut :

- Merupakan kesepakatan bersama yang dideklarasikan oleh negara-negara di wilayah Asia Pasifik (UN-ESCAP), agar hasil pengukuran PDB yang diperoleh dapat dibandingkan secara langsung.
- Tahun 2000 merupakan awal berlangsungnya proses pemulihan ekonomi Indonesia setelah dilanda krisis ekonomi sejak tahun 1998.
- Kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 2000 relatif stabil.
- Tersedianya perangkat data yang lengkap yang disajikan dalam Tabel I-O tahun 2000. Melalui Tabel I-O, keseimbangan antara transaksi “*Supply*” dan “*Demand*” atas berbagai produk barang dan jasa di wilayah domestik dapat dikontrol dengan lebih baik.

Berikut ini dapat dilihat pada Tabel 1 mengenai pergeseran struktur ekonomi Nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 1993 ke tahun 2000.

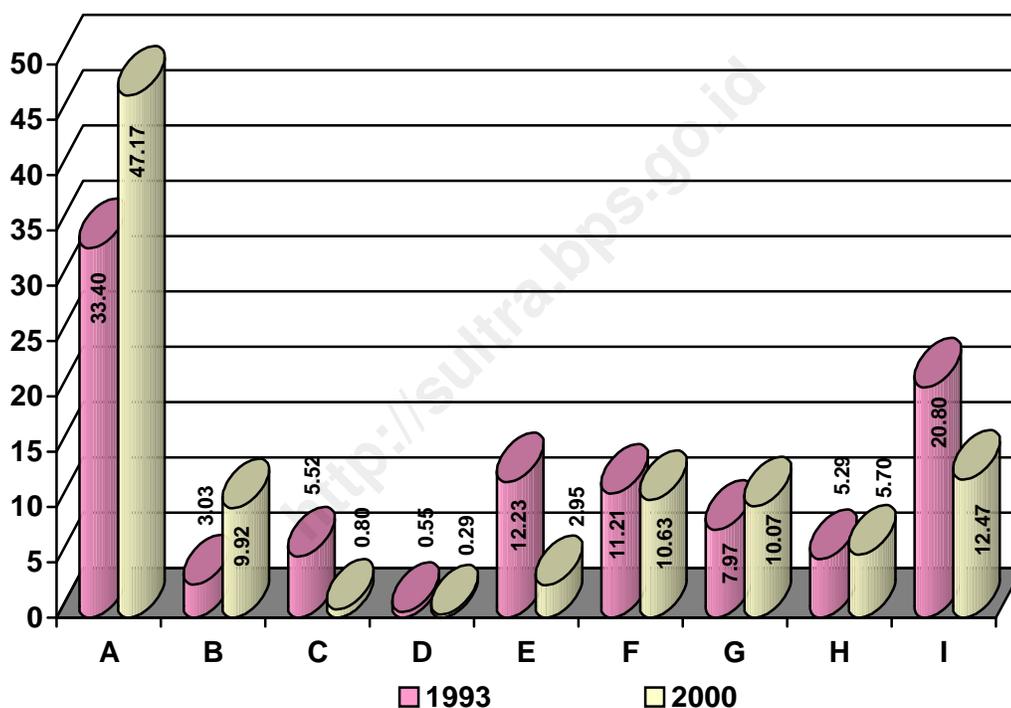
Tabel 1
Struktur Perekonomian Nasional dan Sulawesi Tenggara,
Atas Dasar Harga Berlaku, 1993 dan 2000
(%)

SEKTOR (1)	NASIONAL		SULTRA	
	1993 (2)	2000 (3)	1993 (4)	2000 (5)
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	17,88	17,23	33,73	37,75
2. Pertambangan dan Penggalian	9,55	13,86	3,06	3,99
3. Industri Pengolahan	22,30	24,90	5,58	10,18
4. Listrik dan Air Bersih	1,00	1,31	0,56	0,52
5. Bangunan	6,83	6,05	12,35	7,79
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	16,77	15,74	11,32	14,74
7. Pengangkutan dan Komunikasi	7,05	4,93	8,05	6,19
8. Keu., Persewaan dan Jasa Perusahaan	7,18	6,36	5,34	3,63
9. Jasa-Jasa	11,44	9,63	21,01	15,21
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

Struktur ekonomi Sulawesi Tenggara selama kurun waktu tujuh tahun tetap didominasi oleh sektor pertanian dan terlihat terjadi peningkatannya, dimana tahun 1993 menunjukkan angka 33,37 persen dan tahun 2000 menjadi 37,75 persen; pada sektor industri terjadi peningkatan peranan dari 5,58 persen menjadi 10,18 persen; dan sektor perdagangan, hotel dan restoran dari 11,32 persen tahun 1993 menjadi 14,74 persen tahun 2000. Sebaliknya peranan sektor jasa-jasa menurun dari 21,01 persen menjadi 15,21 persen. Selain sektor jasa-jasa yang mengalami penurunan peranan selama tahun 1993-2000, sektor listrik dan air bersih juga memperlihatkan kecenderungan yang menurun yaitu

dari 0,56 persen menjadi 0,52 persen; sektor bangunan dari 12,35 persen turun menjadi 7,79 persen; sektor angkutan dari 8,05 persen turun menjadi 6,19 persen dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dari 5,34 persen tahun 1993 menjadi 3,63 persen tahun 2000.

Gambar 2.
Struktur Perekonomian Sulawesi Tenggara 1993 dan 2000 (%)



KETERANGAN GAMBAR

- | | |
|---|--|
| A. Pertanian, peternakan, Kehutanan & perikanan | F. Perdagangan, hotel & restoran |
| B. Pertambangan & penggalian | G. Pengangkutan dan komunikasi |
| C. Industri pengolahan | H. Keuangan, persewaan & jasa perusahaan |
| D. Listrik & air bersih | I. Jasa-jasa |
| E. Bangunan | |

2

Tinjauan Produk Domestik Regional Bruto Sulawesi Tenggara



Struktur Ekonomi



Pertumbuhan Ekonomi Regional



PDRB Per Kapita

II. TINJAUAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO SULAWESI TENGGARA

2.1. Struktur Ekonomi

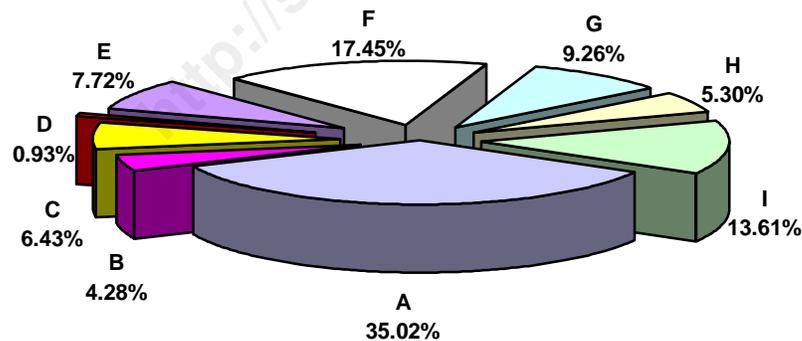
Dalam struktur perekonomian Sulawesi Tenggara seperti terlihat pada Tabel 2, sektor pertanian masih merupakan sektor yang mempunyai peran terbesar terhadap PDRB atas dasar harga berlaku. Peranan sektor ini tahun 2009 menurun dibanding tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2008 peranannya 36,44 persen turun menjadi 35,02 persen tahun 2009. Penurunan ini disebabkan hampir seluruhnya sub sektor yang ada dalam sektor pertanian mengalami penurunan yaitu sub sektor tanaman pangan, 7,61 persen tahun 2008 menjadi 7,11 persen tahun 2009, sub sektor tanaman perkebunan, 10,13 persen tahun 2008 menjadi 9,04 persen tahun 2009, sub sektor peternakan dan hasilnya, 5,60 persen tahun 2008 menjadi 5,54 persen tahun 2009 dan sub sektor kehutanan, 1,34 persen tahun 2008 menjadi 1,33 persen tahun 2009. Sedangkan Sub sektor perikanan, naik dari 11,76 persen tahun 2008 menjadi 12,00 persen tahun 2009.

Selain sektor pertanian, sektor yang mengalami penurunan tahun 2009 adalah sektor pertambangan dan penggalian yaitu dari 4,60 persen menjadi 4,28 persen; sektor industri pengolahan dari 7,62 persen menjadi 6,43 persen; dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dari 5,38 persen menjadi 5,30 persen. Sementara sektor yang mengalami peningkatan adalah sektor listrik, gas dan air bersih yaitu dari 0,87 persen menjadi 0,93 persen; sektor konstruksi/bangunan dari 7,40 persen menjadi 7,72 persen; sektor perdagangan, hotel, dan restoran dari 16,26 persen menjadi 17,45 persen; sektor pengangkutan dan komunikasi dari 8,46 persen menjadi 9,26 persen; sektor jasa - jasa dari 12,97 persen menjadi 13,61 persen.

Tabel 2
Peranan Sektor Ekonomi dalam PDRB Sulawesi Tenggara
Atas Dasar Harga Berlaku, 2005-2009
(%)

Sektor	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	42,38	40,73	38,12	36,44	35,02
2. Pertambangan dan penggalian	4,53	4,05	4,81	4,60	4,28
3. Industri pengolahan	5,78	6,85	7,90	7,62	6,43
4. Listrik dan air bersih	1,05	1,01	0,94	0,87	0,93
5. Konstruksi/bangunan	6,79	6,72	6,92	7,40	7,72
6. Perdagangan, hotel dan restoran	14,22	14,40	15,22	16,26	17,45
7. Pengangkutan dan komunikasi	7,45	7,60	8,17	8,46	9,26
8. Keuangan, persewaan & jasa perusahaan	4,62	5,31	5,04	5,38	5,30
9. Jasa-jasa	13,18	13,33	12,88	12,97	13,61
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Gambar 3
Peranan Sektor Ekonomi dalam PDRB Sulawesi Tenggara
Atas Dasar Harga Berlaku, 2009



Keterangan :

- | | |
|---------------------------|--|
| A. Pertanian | F. Perdagangan, hotel dan restoran |
| B. Pertambangan | G. Angkutan dan komunikasi |
| C. Industri pengolahan | H. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan |
| D. Listrik dan air bersih | I. Jasa-jasa |
| E. Konstruksi/bangunan | |

2.2. Pertumbuhan Ekonomi Regional

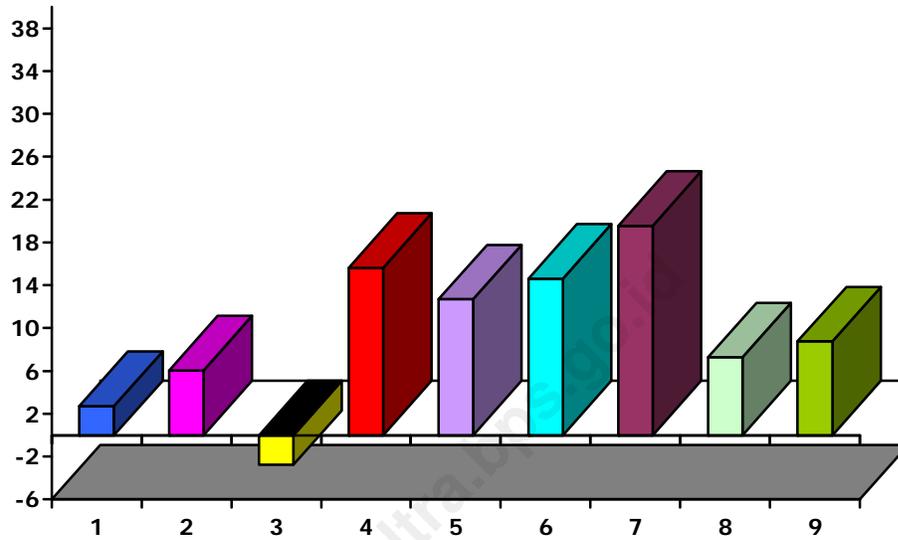
Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara yang diukur berdasarkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan 2000 menunjukkan peningkatan yang cukup mengembirakan dari tahun ke tahun. Mulai tahun 2005 sampai tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara selalu di atas tujuh persen, dan tahun 2009 pertumbuhannya 7,57 persen (Tabel 3).

Pertumbuhan ekonomi tahun 2009 terjadi pada semua sektor ekonomi, kecuali pada sektor industri pengolahan. Pertumbuhan terbesar terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 19,55 persen; sektor listrik dan air bersih tumbuh 15,64; sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh 14,63 persen; sektor konstruksi tumbuh 12,70 persen; sektor jasa-jasa tumbuh 8,78 persen; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tumbuh 7,28 persen; sektor pertambangan dan penggalian tumbuh 6,05 persen, sektor pertanian tumbuh 2,73 persen sedangkan sektor industri pengolahan turun sebesar 2,76 persen.

Tabel 3
Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Sulawesi Tenggara, 2005-2009
(%)

Sektor	2005	2006	2007	2008	2009
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1. Pertanian	6,91	4,57	5,60	5,04	2,73
2. Pertambangan dan penggalian	8,75	-5,69	23,84	-3,26	6,05
3. Industri pengolahan	3,05	30,59	10,42	6,18	-2,76
4. Listrik dan air bersih	17,86	7,61	6,39	7,85	15,64
5. Konstruksi/bangunan	7,25	8,83	9,05	11,30	12,70
6. Perdagangan, hotel dan restoran	8,98	4,69	9,32	10,49	14,63
7. Pengangkutan dan komunikasi	9,40	9,16	5,83	13,70	19,55
8. Keuangan, persewaan & jasa perusahaan	8,80	21,47	7,83	11,51	7,28
9. Jasa-jasa	6,15	6,61	5,99	7,06	8,78
PDRB	7,31	7,68	7,96	7,27	7,57

Gambar 4
Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Sulawesi Tenggara, 2009
(%)



Keterangan :

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Pertanian | 6. Perdagangan, hotel dan restoran |
| 2. Pertambangan | 7. Angkutan dan komunikasi |
| 3. Industri pengolahan | 8. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan |
| 4. Listrik dan air bersih | 9. Jasa-jasa |
| 5. Konstruksi/bangunan | |

2.3. PDRB Per kapita

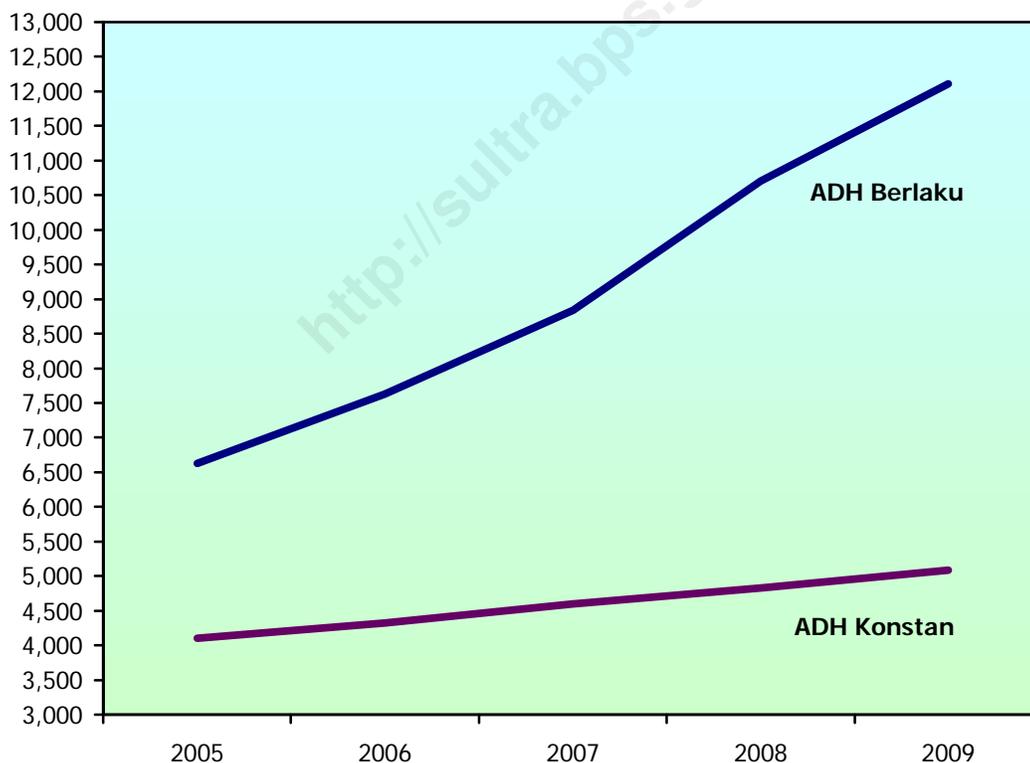
Salah satu tolok ukur untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu daerah dapat dilihat dari besarnya PDRB per kapita. Berdasarkan harga berlaku, PDRB per kapita penduduk Sulawesi Tenggara tahun 2005 adalah 6.627.398,90 rupiah, tahun 2006 meningkat menjadi 7.628.241,30 rupiah atau terjadi peningkatan 15,10 persen. Selanjutnya tahun 2007 meningkat menjadi 8.837.209,76 rupiah atau terjadi peningkatan sebesar 15,85 persen, dan tahun 2008 menjadi 10.686.343,72 rupiah atau meningkat 20,92 persen, tahun 2009 menjadi 12.111.336,51 rupiah atau meningkat 13,33 persen. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2005 sampai tahun 2009, rata-rata peningkatan PDRB per kapita penduduk Sulawesi Tenggara memperlihatkan angka di atas sepuluh. persen, ini menunjukkan tingkat kemakmuran yang semakin baik.

Tabel 4
PDRB Per Kapita Sulawesi Tenggara, 2005-2009
(Rp.)

T a h u n	ADH Berlaku	ADH Konstan 2000
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
2 0 0 5	6.627.398,90	4.098.065,45
2 0 0 6	7.628.241,30	4.317.740,20
2 0 0 7	8.837.209,76	4.593.439,80
2 0 0 8	10.700.301,79	4.824.439,41
2 0 0 9	12.111.336,51	5.083.495,62

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara secara riil, sangat berpengaruh terhadap kenaikan PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2000, dimana tahun 2005 angkanya tercatat sebesar 4.098.065,45 rupiah atau terjadi peningkatan 5,34 persen, kemudian tahun 2006 meningkat menjadi 4.317.740,20 rupiah atau terjadi peningkatan 5,37 persen, dan pada tahun 2007 meningkat menjadi 4.593.439,80 rupiah atau terjadi peningkatan 6,39 persen, tahun 2008 meningkat lagi menjadi 4.824.439,41 persen atau terjadi peningkatan 5.03 persen, selanjutnya tahun 2009 meningkat menjadi 5.083.495,62 persen atau terjadi peningkatan 5,37 persen.

Gambar 5
PDRB Per Kapita Sulawesi Tenggara, 2005–2009
(Ribu Rp.)



3

Perkembangan Ekonomi Sektoral & Peranannya



Pertanian



Pertambangan & Penggalian



Industri Pengolahan



Listrik & Air Bersih



Bangunan



Perdagangan, Hotel dan Restoran



Angkutan & Komunikasi



Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan



Jasa-Jasa

III. PERKEMBANGAN EKONOMI SEKTORAL DAN PERANANNYA

Penyajian PDRB menurut lapangan usaha dibagi menjadi sembilan sektor ekonomi, seringkali disingkat sektor, dan masing-masing dirinci menjadi sub sektor. Pemecahan menjadi sub sektor ini sedapat mungkin sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI). Perkembangan setiap sektor diuraikan pada sub bab berikut ini.

3.1. Pertanian

Sektor pertanian mencakup sub sektor tanaman bahan makanan, sub sektor tanaman perkebunan, sub sektor peternakan dan hasilnya, sub sektor kehutanan dan sub sektor perikanan. Hingga tahun 2009, sektor pertanian masih merupakan sektor andalan Sulawesi Tenggara dalam penciptaan PDRB yaitu 35,02 persen. Ini berarti bahwa perekonomian Sulawesi Tenggara masih tergantung terhadap kegiatan pertanian (Tabel. 6).

Merujuk ke Tabel. 5, tahun 2009 sektor pertanian mengalami pertumbuhan 2,73 persen, lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan yang dicapai tahun 2008 yang tumbuh 5,04 persen. Rendahnya pertumbuhan yang dicapai sektor pertanian pada tahun 2009 ini disebabkan karena dua sub sektor yang tercakup dalam sektor pertanian dan merupakan sub sektor yang memberikan sumbangan terbesar kedua dan ketiga dalam sektornya, yaitu sub sektor tanaman pangan dan sub sektor perkebunan pertumbuhannya mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,81 persen dan 3,71 persen.

Sub sektor tanaman bahan makanan tahun 2009 mengalami penurunan dengan pertumbuhan negatif 1,81 persen, hal ini disebabkan beberapa komoditas palawija mengalami penurunan produksi yaitu jagung, kacang tanah, kacang hijau, dan ubi jalar. Demikian juga untuk sub sektor perkebunan yang tumbuh negatif 3,71 persen, hal ini disebabkan turunnya produksi kakao dan kelapa

Sub sektor peternakan tahun 2009 mengalami pertumbuhan 8,76 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan yang dicapai pada tahun 2008 yang tumbuh 7,49 persen.

Pertumbuhan yang dicapai didukung oleh beberapa jenis ternak yang mengalami peningkatan populasi yaitu sapi, kerbau, kambing, dan domba, serta produksi hasil peternakan lainnya.

Sub sektor kehutanan tahun 2009 tumbuh 7,18 persen, lebih tinggi dibanding pertumbuhan yang dicapai tahun 2008 yaitu 6,16 persen. Tingginya pertumbuhan pada tahun ini disebabkan karena meningkatnya komoditas kayu rimba gelondongan dan rotan.

Pertumbuhan sub sektor perikanan didukung oleh meningkatnya produksi perikanan laut utamanya komoditas rumput laut sehingga mengakibatkan pertumbuhan tahun 2009 ini naik sebesar 9,85 persen. Pertumbuhan ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan yang dicapai tahun 2008 yang tumbuh 8,96 persen.

Tabel. 5
Pertumbuhan Sektor Pertanian Sulawesi Tenggara
Atas Dasar Harga Konstan 2000, 2005 - 2009
(%)

Sub Sektor	2005	2006	2007	2008	2009
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1. Tanaman bahan makanan	2,87	0,52	7,65	0,83	-1,81
2. Tanaman perkebunan	7,16	5,82	4,56	3,21	-3,71
3. Peternakan dan hasilnya	7,69	3,26	3,14	7,49	8,76
4. Kehutanan	6,13	1,53	3,94	6,16	7,18
5. Perikanan	9,53	7,16	6,95	8,96	9,85
Pertanian	6,91	4,57	5,60	5,04	2,73

Pada Tabel. 6 terlihat sektor pertanian memberikan kontribusi terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku yaitu 35,03 persen tahun 2009, sedikit lebih kurang dibanding tahun 2008 dengan kontribusi 36,49 persen. Hal ini disebabkan karena dari lima sub sektor yang ada pada sektor ini semuanya mengalami penurunan kontribusi kecuali sub sektor perikanan. Adapun keempat sub sektor yang mengalami penurunan adalah sub sektor

tanaman bahan makanan berkurang dari 7,61 persen tahun 2008 menjadi 7,11 persen tahun 2009, sub sektor perkebunan berkurang dari 10,13 persen menjadi 9,04 persen, sub sektor peternakan dan hasilnya berkurang dari 5,60 persen menjadi 5,54 persen, dan sub sektor kehutanan berkurang dari 1,34 persen menjadi 1,33 persen.

Tabel 6
Peranan Sektor Pertanian terhadap PDRB Sulawesi Tenggara
Atas Dasar Harga Berlaku, 2005 - 2009
(%)

Sub Sektor	2005	2006	2007	2008	2009
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1. Tanaman bahan makanan	9,35	8,79	8,13	7,62	7,11
2. Tanaman perkebunan	13,51	12,19	10,91	10,15	9,04
3. Peternakan dan hasilnya	5,76	5,74	5,51	5,61	5,54
4. Kehutanan	1,48	1,46	1,38	1,34	1,33
5. Perikanan	12,27	12,55	12,19	11,77	12,01
Pertanian	42,37	40,73	38,12	36,49	35,03

3.2. Pertambangan dan Penggalian

Sektor pertambangan dan penggalian merupakan salah satu sektor yang penting dalam perekonomian Sulawesi Tenggara karena produk dari sektor ini menjadi bahan baku industri pengolahan. Sektor ini terdiri dari sub sektor pertambangan tanpa migas dan sub sektor penggalian. Merujuk ke Tabel 7, tahun 2008 pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan 3,26 persen, hal ini disebabkan menurunnya

pertumbuhan sub sektor pertambangan tanpa migas sebesar 11,25 persen, yang disebabkan menurunnya produksi biji nikel. Selanjutnya pada tahun 2009 sektor ini kembali mengalami peningkatan 6,05 persen, walaupun sub sektor pertambangan tanpa migas masih menurun 0,95 persen namun sub sektor penggalian mampu meningkat 21,22 persen.

Tabel 7
Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian Sulawesi Tenggara
Atas Dasar Harga Konstan 2000, 2005 - 2009
(%)

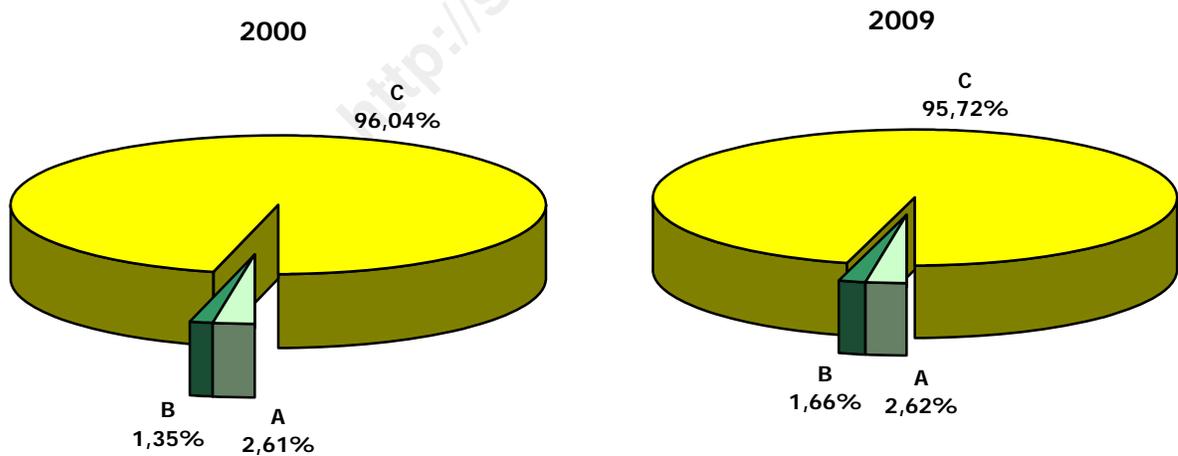
Sub Sektor	2005	2006	2007	2008	2009
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1. Pertambangan tanpa Migas	8,06	-9,92	28,97	-11,25	-0,95
2. Penggalian	10,85	7,00	10,90	20,20	21,22
Pertambangan dan Penggalian	8,75	-5,69	23,84	-3,26	6,05

Besarnya kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB pada tahun 2009 4,28 persen, sedikit lebih kurang dari kontribusi tahun sebelumnya sebesar 4,60 persen. Hal ini disebabkan kontribusi sub sektor pertambangan tanpa migas yang merupakan kontributor terbesar dalam sektornya berkurang dari 3,08 persen tahun 2008 menjadi 2,62 persen tahun 2009. Sedangkan kontribusi sub sektor penggalian terhadap PDRB mengalami peningkatan yaitu 1,52 persen tahun 2008 menjadi 1,66 tahun 2009. Jika dilihat dari sumbangan masing-masing komoditas terhadap sektor pertambangan dan penggalian, maka biji nikel merupakan komoditas terbesar dalam pembentukan nilai tambah sektornya yaitu 66,93 persen tahun 2008. Sehingga pada saat produksi komoditas biji nikel meningkat atau menurun tajam, akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian (Tabel 8).

Tabel 8
Peranan Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Sulawesi Tenggara
Atas Dasar Harga Berlaku, 2005 - 2009
(%)

Sub Sektor	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertambangan tanpa Migas	3,19	2,76	3,52	3,08	2,62
2. Penggalian	1,34	1,29	1,29	1,52	1,66
Pertambangan dan Penggalian	4,53	4,05	4,81	4,60	4,28

Gambar 6
Peranan Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB
Sulawesi Tenggara, 2000 dan 2009



Keterangan :

A = Pertambangan B = Penggalian C = Sektor lainnya

3.3. Industri Pengolahan

Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan turun sebesar 2,67 persen, sedangkan tahun sebelumnya mengalami peningkatan 6,18 persen. Menurunnya pertumbuhan sektor ini disebabkan karena kelompok industri logam dasar besi dan baja yang merupakan penyumbang terbesar dalam sektor industri pengolahan turun sebesar 14,65 persen, meskipun kelompok industri lainnya seluruhnya mengalami pertumbuhan positif namun tidak mampu mendorong pertumbuhan sektornya untuk tumbuh positif (Tabel 9).

Tabel 9
Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan tanpa Migas Sulawesi Tenggara
Atas Dasar Harga Konstan 2000, 2005 - 2009
 (%)

Sub Sektor	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Makanan, minuman dan tembakau	7,38	4,81	7,31	12,48	16,07
2. Tekstil, barang kulit dan alas kaki	4,02	1,31	3,92	8,56	11,25
3. Barang kayu dan hasil hutan lainnya	2,00	3,73	8,25	9,91	7,13
4. Kertas dan barang cetakan	12,00	14,28	13,07	40,88	88,09
5. Pupuk, kimia dan barang dari karet	2,00	7,28	0,90	17,68	14,96
6. Semen dan barang galian bukan logam	20,00	-5,76	5,98	9,74	3,02
7. Logam dasar besi dan baja	-0,41	58,38	12,44	2,58	-14,65
8. Alat angkut, mesin dan peralatannya	3,18	1,29	1,36	-13,07	6,51
9. Barang lainnya	7,03	5,02	11,61	15,07	19,24
Industri Pengolahan tanpa Migas	3,05	30,59	10,42	6,18	-2,67

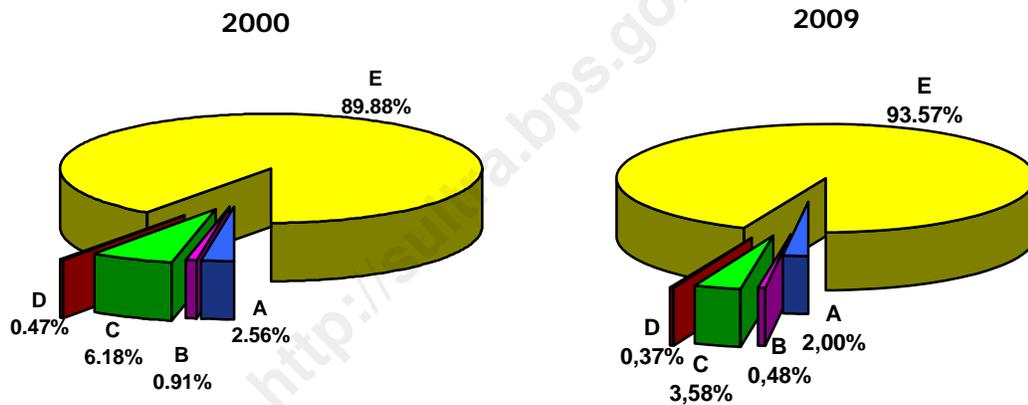
Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian Sulawesi Tenggara mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Terlihat pada Tabel 10, peranan sektor industri pengolahan tahun 2005 sebesar 5,78 persen, tahun 2006 dan 2007 bertambah masing-masing menjadi 6,85 persen dan 7,90 persen. Selanjutnya tahun 2008 berkurang menjadi 7,63 persen dan tahun 2009 berkurang lagi menjadi 6,43 persen. Penurunan kontribusi sejalan dengan melambatnya pertumbuhan sektor ini yang disebabkan karena kelompok industri logam dasar besi dan baja yang merupakan penyumbang terbesar dalam sektor industri mengalami pertumbuhan yang melambat, bahkan pada tahun 2009 mengalami penurunan yang disebabkan menurunnya produksi ferro nikel.

Tabel 10
Peranan Sektor Industri Pengolahan tanpa Migas terhadap PDRB
Sulawesi Tenggara Atas Dasar Harga Berlaku, 2005 - 2009
 (%)

Sub Sektor	2005	2006	2007	2008	2008
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1. Makanan, minuman dan tembakau	1,85	1,79	1,88	1,88	2,00
2. Tekstil, barang kulit dan alas kaki	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08
3. Barang kayu dan hasil hutan lainnya	0,55	0,49	0,47	0,49	0,48
4. Kertas dan barang cetakan	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03
5. Pupuk, kimia dan barang dari karet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Semen dan barang galian bukan logam	0,16	0,13	0,12	0,12	0,11
7. Logam dasar besi dan baja	2,96	4,19	5,20	4,89	3,58
8. Alat angkut, mesin dan peralatannya	0,04	0,04	0,03	0,02	0,02
9. Barang lainnya	0,12	0,11	0,11	0,12	0,13
Industri Pengolahan tanpa Migas	5,78	6,85	7,90	7,63	6,43

Masih relatif sama dengan tahun sebelumnya, kontribusi terbesar pada sektor industri pengolahan ini diberikan oleh kelompok industri pengolahan logam dasar besi dan baja yaitu 3,58 persen, dan kedua oleh kelompok industri pengolahan makanan, minuman dan tembakau dengan kontribusi 2,00 persen, sementara kelompok industri pengolahan lainnya hanya memberikan kontribusi di bawah satu persen.

Gambar 7
Peranan Sektor Industri Pengolahan tanpa Migas Sulawesi Tenggara, 2000 dan 2009



Keterangan :

- | | |
|--|--|
| A = Industri pengolahan makanan,
Minuman dan tembakau | C = Industri pengolahan logam
dasar besi dan baja |
| B = Industri pengolahan barang kayu
dan hasil hutan lainnya | D = Industri pengolahan lainnya |
| | E = Sektor lainnya |

3.4. Listrik dan Air Bersih

Sektor ini merupakan sektor penunjang seluruh kegiatan ekonomi serta infrastruktur yang mendorong aktivitas proses produksi sektoral sekaligus sarana pemenuhan kebutuhan masyarakat. Produksi listrik sebagian besar dihasilkan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan lainnya oleh non PLN, sedangkan air bersih semata-mata dihasilkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Sektor listrik dan air bersih pada tahun 2009 mengalami pertumbuhan 15,64 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tumbuh 7,85 persen. Hal ini disebabkan oleh karena sub sektor listrik yang memberikan sumbangan terbesar pada sektor ini, mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan yang dicapai tahun 2008 yaitu 7,20 persen naik menjadi 15,25 persen tahun 2009. Demikian pula sub sektor air bersih tahun 2009 tumbuh 20,98 persen lebih tinggi dari tahun 2008 yang tumbuh 17,78 persen (Tabel 11).

Tabel 11
Pertumbuhan Sektor Listrik dan Air Bersih Sulawesi Tenggara
Atas Dasar Harga Konstan 2000, 2005 - 2009
 (%)

Sub Sektor	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Listrik	18,49	6,93	6,30	7,20	15,25
2. Air bersih	8,00	19,20	7,83	17,78	20,98
Listrik dan Air Bersih	17,86	7,61	6,39	7,85	15,64

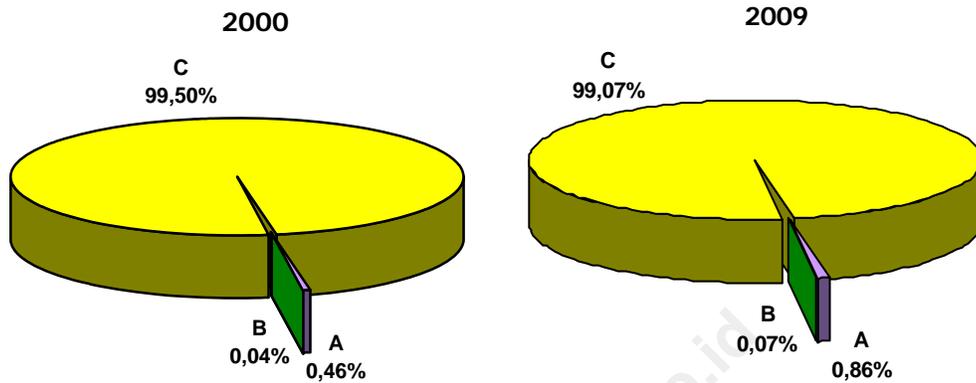
Diantara sektor-sektor lainnya, sektor listrik dan air bersih memiliki kontribusi paling kecil terhadap penciptaan total PDRB. Pada Tabel 12. terlihat peranan sektor ini tahun 2005 hanya 1,05 persen, tahun 2006 sedikit berkurang menjadi 1,01 persen, tahun 2007 berkurang menjadi 0,94 persen dan tahun 2008 berkurang lagi menjadi 0,87 persen, selanjutnya tahun 2009 bertambah menjadi 0,93 persen. Hal ini disebabkan karena pergerakan sektor lainnya lebih dominan, sehingga walaupun pertumbuhannya cukup tinggi, namun peranannya relatif berkurang.

Tabel 12
Peranan Sektor Listrik dan Air Bersih terhadap PDRB Sulawesi Tenggara
Atas Dasar Harga Berlaku, 2005 - 2009
(%)

Sub Sektor	2005	2006	2007	2008	2009
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1. Listrik	1,00	0,95	0,88	0,81	0,86
2. Air bersih	0,05	0,06	0,06	0,06	0,07
Listrik dan Air Bersih	1,05	1,01	0,94	0,87	0,93

Walaupun sektor listrik dan air bersih memiliki kontribusi paling kecil terhadap pembentukan total PDRB, karena hanya mampu memberikan sumbangan sekitar satu persen, namun sektor ini sangat dibutuhkan oleh semua sektor.

Gambar 8
Peranan Sektor Listrik dan Air Bersih terhadap PDRB Sulawesi Tenggara, 2000 dan 2009



Keterangan :

A = Listrik

B = Air bersih

C = Sektor lainnya

3.5. Bangunan

Perkembangan pembangunan nasional yang mencakup segala aspek hasil pembangunan fisik juga terjadi di berbagai wilayah Sulawesi Tenggara. Sejak dekade terakhir, sektor konstruksi tumbuh pesat dan menakjubkan. Hal ini ditandai dengan maraknya pembangunan di bidang properti yang dipasarkan untuk memenuhi permintaan domestik yang semakin meningkat. Kebijakan pemerintah yang menyangkut otonomi daerah mendorong terbentuknya pemerintah daerah baru sehingga ikut mempengaruhi peningkatan produk pembangunan konstruksi, seperti prasarana dan sarana fisik dalam rangka meningkatkan perkembangan daerah baru.

Meningkatnya pendapatan masyarakat dan tingkat suku bunga yang menarik dari perbankan mendorong masyarakat untuk membelanjakannya di pasar properti sehingga berakibat sektor bangunan melaju cukup tinggi.

Tabel 13
Pertumbuhan Sektor Bangunan Sulawesi Tenggara
Atas Dasar Harga Konstan 2000, 2005 - 2009
 (%)

Sektor	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangunan	7,25	8,83	9,05	11,30	12,70

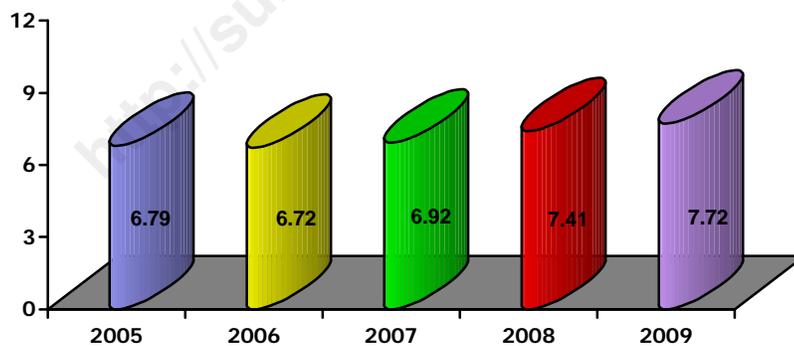
Sejak tahun 2000 arah perkembangan yang positif pada perekonomian Sulawesi Tenggara nampaknya terus berlangsung hingga tahun 2009. Secara absolut sektor bangunan meningkat cukup tinggi, ditandai dengan pertumbuhannya yang terus meningkat dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. Seperti terlihat pada Tabel 13, dengan pertumbuhan positif yang dicapai pada tahun 2005 sebesar 7,25 persen, meningkat menjadi 8,83 persen tahun 2006 dan 9,05 persentahun 2007. Selanjutnya dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian Sulawesi Tenggara, kegiatan sektor propertipun mengalami perkembangan yang positif, sehingga tahun 2008 dan 2009 sektor bangunan tumbuh masing-masing 11,30 persen dan 12,70 persen.

Seiring dengan pertumbuhannya, kontribusi sektor bangunan terhadap PDRB terjadi fluktuasi tiap tahunnya, karena percepatan pertumbuhan sektor lainnya sedikit lebih baik dibanding sektor bangunan. Tahun 2005 kontribusi yang diberikan oleh sektor bangunan yaitu 6,79 persen, berkurang menjadi 6,72 persen tahun 2006. Namun pada tahun 2007 sampai 2009 bertambah lagi menjadi 6,92 persen tahun 2007, 7,40 persen tahun 2008 dan 7,72 persen tahun 2009 (Tabel 14).

Tabel 14
Peranan Sektor Bangunan terhadap PDRB Sulawesi Tenggara
Atas Dasar Harga Berlaku, 2005 - 2009
 (%)

Sektor	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangunan	6,79	6,72	6,92	7,40	7,72

Gambar 9
Peranan Sektor Bangunan terhadap PDRB Sulawesi Tenggara, 2005 - 2009
 (%)



3.6. Perdagangan, Hotel dan Restoran

Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran berperan sebagai penunjang kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk barang dan jasa. Secara keseluruhan sektor ini tahun

2009 tumbuh 14,63 persen, lebih tinggi jika dibanding dengan pertumbuhan yang dicapai pada tahun sebelumnya yaitu 10,49 persen. Tabel 15, memperlihatkan pertumbuhan yang dicapai pada tahun 2009, dimana pertumbuhan yang dicapai didukung oleh semua sub sektornya yang mengalami pertumbuhan positif. Sub sektor perdagangan mengalami pertumbuhan 14,42 persen pada tahun 2009, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 10,36 persen. Sub sektor hotel tumbuh 11,24 persen pada tahun 2009, lebih rendah jika dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 19,22 persen. Keterkaitan yang erat antara sub sektor hotel dengan wisatawan asing (wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnu) membuat perkembangan produksi perhotelan sangat dipengaruhi oleh kunjungan wisatawan dan indikator yang paling tepat untuk memperkirakannya adalah lamanya wisatawan menginap selama berkunjung di Sulawesi Tenggara. Sementara itu sub sektor restoran pada tahun 2008 mampu tumbuh 15,38 persen, tahun 2009 meningkat menjadi 23,61 persen.

Tabel 15
Pertumbuhan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Sulawesi Tenggara
Atas Dasar Harga Konstan 2000, 2005 - 2009
 (%)

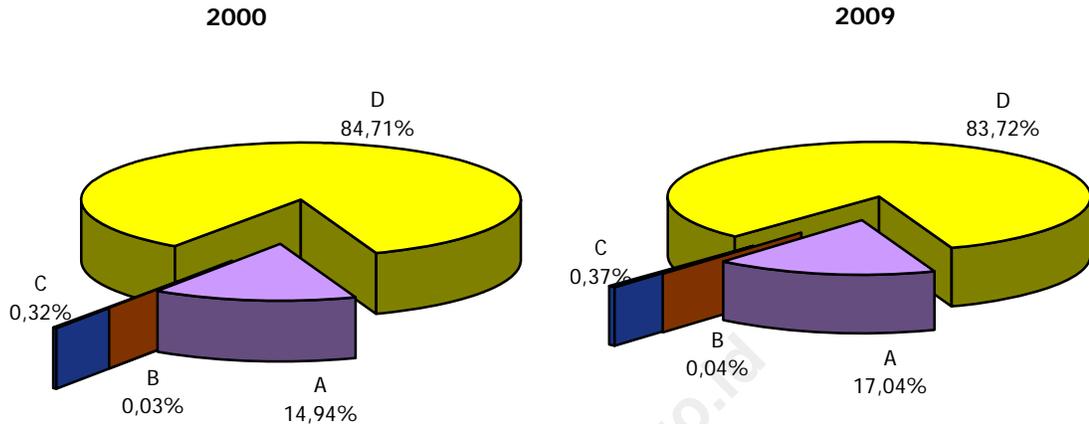
Sektor/ Sub Sektor	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Perdagangan	8,98	4,58	9,40	10,36	14,42
2. Hotel	6,55	12,32	9,49	19,22	11,24
3. Restoran	9,15	8,87	5,70	15,38	23,61
Perdagangan, Hotel Dan Restoran	8,98	4,69	9,32	10,49	14,63

Seiring dengan pertumbuhan yang dicapai sektor ini, maka kontribusinya terhadap PDRB Sulawesi Tenggara juga mengalami peningkatan yaitu dari 16,78 persen tahun 2008 naik menjadi 17,45 persen tahun 2009. Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran menduduki urutan kedua setelah sektor pertanian. Sektor perdagangan sebagai sektor jasa penghubung antara produsen dengan konsumen memperoleh sumbangan terbesar dari sub sektor perdagangan besar dan eceran yaitu 13,88 persen tahun 2005, bertambah menjadi 14,06 persen pada tahun 2006, 14,88 persen tahun 2007, 15,81 persen tahun 2008 dan tahun 2009 bertambah lagi menjadi 17,04 persen. Kemudian sub sektor hotel dari tahun 2005 sampai tahun 2008 memberikan kontribusi yang tetap yaitu 0,03 persen, tahun 2009 bertambah menjadi 0,04 persen. Sedangkan sub sektor restoran juga memberikan kontribusi tetap yaitu 0,31 persen dari tahun 2005 sampai tahun 2007. Namun pada tahun 2008 dan 2009 bertambah masing-masing menjadi 0,34 persen dan 0,37 persen. (Tabel 16).

Tabel 16
Peranan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran terhadap PRDB Sulawesi Tenggara
Atas Dasar Harga Berlaku, 2005 - 2009
(%)

Sektor/ Sub Sektor	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Perdagangan	13,88	14,06	14,88	15,89	17,04
2. Hotel	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
3. Restoran	0,31	0,31	0,31	0,34	0,37
Perdagangan, Hotel Dan Restoran	14,22	14,40	15,22	16,26	17,45

Gambar 10
Peranan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran terhadap PDRB
Sulawesi Tenggara, 2000 dan 2009



Keterangan :

A = Perdagangan besar & eceran
 C = Restoran

B = Hotel
 D = Sektor lainnya

3.7. Pengangkutan dan Komunikasi

Sektor pengangkutan dan komunikasi memiliki peranan sebagai pendorong aktivitas di setiap sektor ekonomi. Dalam era globalisasi ekonomi, peranan sektor ini sangat vital dan menjadi indikator kemajuan suatu daerah, terutama jasa telekomunikasi yang menjadikan dunia sebagai wilayah tanpa batas. Sub sektor transportasi memiliki peran sebagai jasa pelayanan bagi mobilitas kegiatan perekonomian. Sebagai sektor yang sangat mendukung aktivitas sektor riil, sektor pengangkutan dan komunikasi berkaitan erat dengan sektor-sektor lain. Dinamisnya mobilitas masyarakat dan aktifnya perekonomian mendorong laju pertumbuhan sektor ini.

Tabel 17
Pertumbuhan Sektor Angkutan dan Komunikasi Sulawesi Tenggara, 2005 - 2009
(%)

Sub Sektor	2005	2006	2007	2008	2009
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1. Angkutan jalan raya	9,94	8,55	4,06	10,85	11,14
2. Angkutan laut	6,73	5,26	1,30	1,65	13,83
3. Angk. sungai, danau & penyeberangan	13,12	12,96	12,27	8,66	26,02
4. Angkutan udara	0,86	10,41	7,49	29,19	45,55
5. Jasa penunjang angkutan	7,36	8,59	5,90	8,57	19,36
Angkutan	8,53	8,67	4,53	12,59	16,65
Komunikasi	15,41	12,36	13,93	20,09	35,13
Angkutan & Komunikasi	9,40	9,16	5,83	13,70	19,55

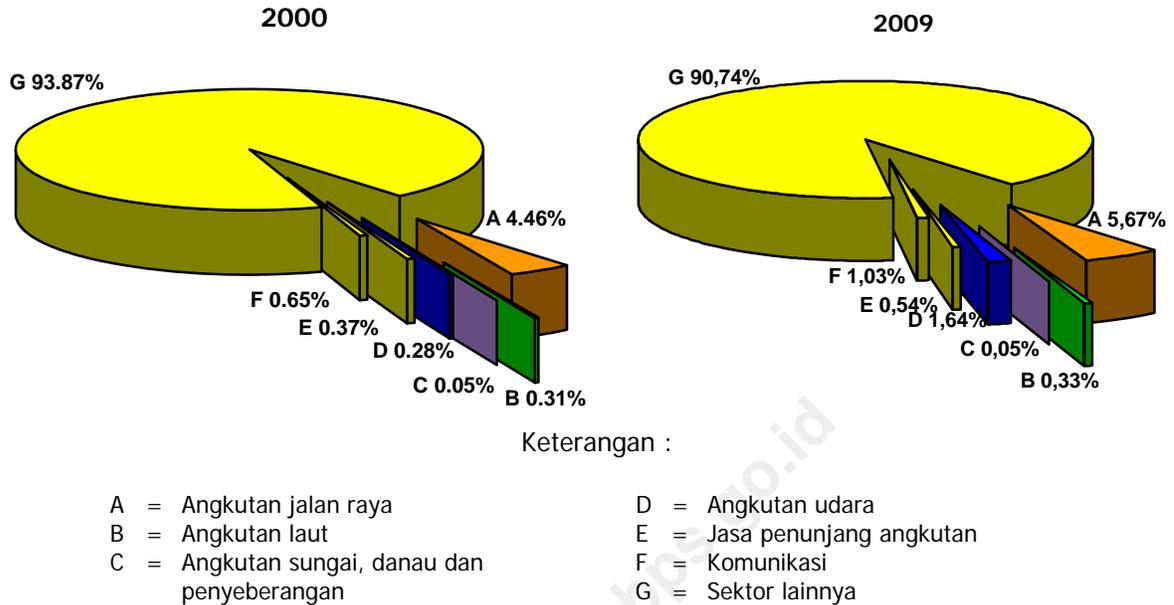
Merujuk ke Tabel 17, sektor pengangkutan dan komunikasi tahun 2005 tumbuh 9,40 persen, kemudian tahun 2006 pertumbuhannya sedikit melambat yaitu 9,16 persen. Pada tahun 2007 mengalami pertumbuhan yang melambat lagi yaitu 5,83 persen, namun pada tahun 2008 dan 2009 kembali meningkat masing-masing menjadi 13,70 persen dan 19,55 persen. Peningkatan ini didukung oleh pertumbuhan kedua sub sektornya yang tumbuh positif yaitu sub sektor angkutan pada tahun 2008 tumbuh 12,59 persen dan tahun 2009 tumbuh 16,65 persen, tingginya pertumbuhan sub sektor angkutan utamanya didorong oleh peningkatan sub sektor angkutan udara yang cukup tinggi yaitu 29,19 persen tahun 2008 dan 45,55 persen tahun 2009. Sedangkan sub sektor komunikasi tahun 2008 tumbuh 20,09 persen dan tahun 2009 tumbuh 35,13 persen.

Sejalan dengan pertumbuhannya, kontribusi sektor angkutan dan komunikasi terhadap total PDRB dari tahun 2005 sampai tahun 2009 menunjukkan trend yang meningkat yaitu dari 7,45 persen tahun 2005 naik menjadi 7,60 persen tahun 2006, 8,17 persen tahun 2007, 8,49 persen tahun 2008 dan 9,26 persen tahun 2009. Kontribusi terbesar diberikan oleh sub sektor angkutan yaitu 6,62 persen tahun 2005, 6,72 persen tahun 2006, 7,26 persen tahun 2007, 7,53 persen tahun 2008 dan. 8,23 persen tahun 2009. Sedangkan sub sektor komunikasi hanya memberikan kontribusi 0,83 persen tahun 2005, 0,88 persen tahun 2006, 0,91 persen pada tahun 2007, 0,93 persen tahun 2008 dan 1,03 persen tahun 2009 (Tabel 18).

Tabel 18
Peranan Sektor Angkutan dan Komunikasi terhadap PDRB
Sulawesi Tenggara, 2005- 2009
 (%)

Sub Sektor	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Angkutan jalan raya	5,01	5,15	5,46	5,50	5,67
2. Angkutan laut	0,31	0,31	0,33	0,31	0,33
3. Angk. sungai, danau & penyeberangan	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05
4. Angkutan udara	0,82	0,80	0,93	1,18	1,64
5. Jasa penunjang angkutan	0,44	0,42	0,50	0,50	0,54
Angkutan	6,62	6,72	7,26	7,53	8,23
Komunikasi	0,83	0,88	0,91	0,93	1,03
Angkutan & Komunikasi	7,45	7,60	8,17	8,49	9,265

Gambar 11
Peranan Sektor Angkutan dan Komunikasi terhadap PDRB Sulawesi Tenggara, 2000 dan 2009



3.8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Secara garis besar klasifikasi sektor ini terbagi atas lima kelompok kegiatan utama yaitu usaha perbankan dan moneter (otoritas moneter), lembaga keuangan bukan bank, jasa penunjang keuangan, usaha persewaan bangunan dan tanah serta jasa perusahaan. Sektor ini disebut sebagai sektor finansial karena secara umum kegiatan utamanya berhubungan dengan kegiatan pengelolaan keuangan yang bersumber dari penarikan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali.

Dengan membaiknya perekonomian Indonesia saat ini dibanding dua tahun pertama terjadinya krisis, maka tahun 2005 pertumbuhan sektor keuangan menunjukkan titik terang dengan pertumbuhan positif yaitu 8,80 persen, tahun 2006 menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu 21,47 persen. Tahun 2007 pertumbuhan sektor ini melambat dengan pertumbuhan sebesar 7,83 persen, tahun 2008 meningkat menjadi 11,51

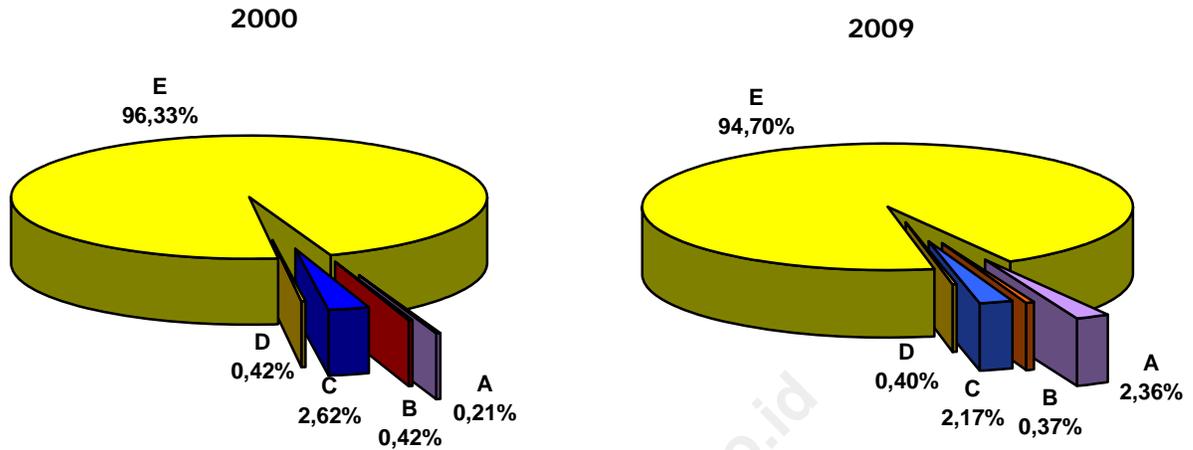
persen dan pada tahun 2009 kembali melambat dengan pertumbuhan 7,28 persen. Melambatnya pertumbuhan pada tahun 2009 ini disebabkan karena pertumbuhan yang terjadi di semua sub sektornya lebih rendah dari pertumbuhan tahun sebelumnya. Sub sektor bank tumbuh sebesar 14,51 persen tahun 2008 dan tahun 2009 hanya tumbuh 10,16 persen, sub sektor lembaga keuangan tanpa bank tumbuh 14,30 persen tahun 2008 dan tahun 2009 hanya tumbuh 4,32 persen, sub sektor sewa bangunan tumbuh 7,57 persen tahun 2008 dan tahun 2009 hanya tumbuh 4,02 persen, sub sektor jasa perusahaan tumbuh 11,54 persen tahun 2008 dan tahun 2009 hanya tumbuh 9,22 persen.(Tabel 19).

Seiring dengan pertumbuhannya, maka kontribusi sektor ini juga mengalami fluktuasi setiap tahunnya, yaitu dari 4,62 persen tahun 2005 bertambah menjadi 5,31 persen tahun 2006, berkurang menjadi 5,04 persen tahun 2007. Selanjutnya tahun 2008 kembali bertambah menjadi 5,38 persen dan pada tahun 2009 sedikit berkurang menjadi 5,30 persen. Jika dilihat dari sub sektornya maka kontribusi terbesar diberikan oleh sub sektor perbankan sebesar 2,36 persen dan sub sektor sewa bangunan sebesar 2,17 persen, sedangkan sub sektor lainnya memberikan kontribusi yang relatif kecil yaitu dibawah satu persen (Tabel 20).

Tabel 19
Pertumbuhan Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
Sulawesi Tenggara, 2005 - 2009
(%)

Sub Sektor	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. B a n k	12,54	50,47	13,47	14,51	10,16
2. Lembaga keuangan tanpa bank	8,90	8,19	4,62	14,30	4,32
3. Jasa penunjang keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sewa bangunan	6,47	5,65	2,62	7,57	4,02
5. Jasa perusahaan	7,50	7,59	7,94	11,54	9,22
Keuangan, persewaan & jasa perusahaan	8,80	21,47	7,83	11,51	7,28

Gambar 12
Peranan Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan terhadap PDRB Sulawesi Tenggara, 2000 dan 2009



Keterangan :

A = B a n k
B = Lembaga keuangan tanpa bank

C = Sewa bangunan
D = Jasa perusahaan
E = Sektor lainnya

Tabel 20
Peranan Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan terhadap PDRB Sulawesi Tenggara, 2005 - 2009 (%)

Sub Sektor	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. B a n k	1,52	2,15	2,23	2,38	2,36
2. Lembaga keuangan tanpa bank	0,35	0,39	0,37	0,39	0,37
3. Jasa penunjang keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sewa bangunan	2,35	2,38	2,08	2,19	2,17
5. Jasa perusahaan	0,40	0,39	0,36	0,42	0,40
Keuangan, persewaan & jasa perusahaan	4,62	5,31	5,04	5,38	5,30

3.9. Jasa-Jasa

Sektor jasa-jasa digolongkan menjadi dua sub sektor yaitu sub sektor jasa pemerintahan umum yang mencakup administrasi pemerintahan dan pertahanan, serta jasa pemerintahan lainnya. Sub sektor kedua adalah sub sektor jasa swasta meliputi jasa sosial kemasyarakatan (pendidikan, kesehatan dan jasa-jasa kemasyarakatan lainnya), jasa hiburan dan rekreasi, serta jasa perorangan dan rumahtangga.

Pertumbuhan sektor jasa-jasa pada tahun 2009 sebesar 8,78 persen lebih tinggi jika dibanding tahun 2007 yang tumbuh 7,06 persen. Pertumbuhan ini didukung oleh meningkatnya pertumbuhan kedua sub sektornya yaitu sub sektor jasa pemerintahan umum tumbuh 7,81 persen sebagai akibat terus meningkatnya pengeluaran pemerintah dan belanja pegawai. Sub sektor jasa-jasa swasta mengalami pertumbuhan 18,45 persen, sebagai akibat peningkatan sub sektornya terutama sub sektor jasa perorangan dan rumahtangga yang merupakan penyumbang terbesar dalam sub sektor jasa swasta yaitu sebesar 19,40 persen (Tabel 21).

Tabel 21
Pertumbuhan Sektor Jasa-Jasa Sulawesi Tenggara, 2005- 2009
 (%)

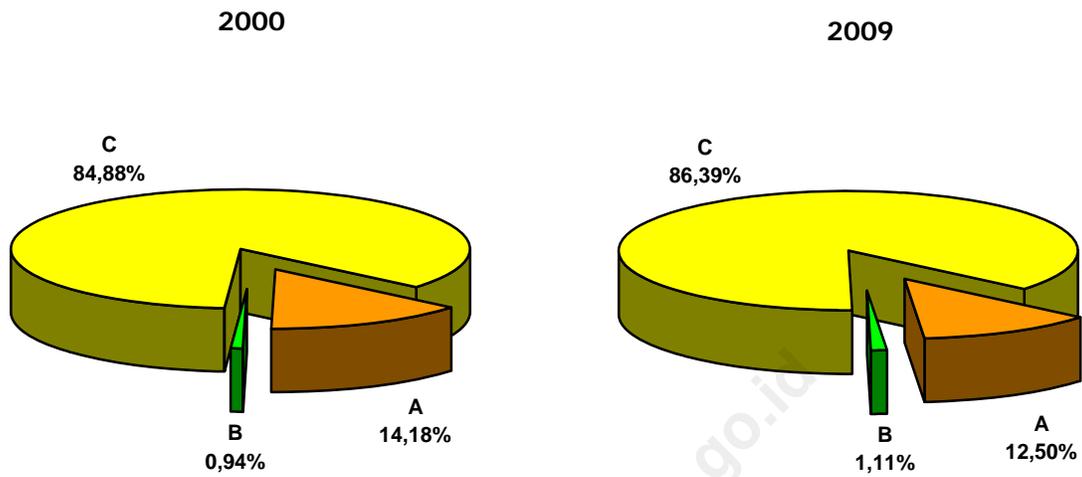
Sub Sektor	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jasa-Jasa	6,15	6,61	5,99	7,06	8,78
1. Pemerintahan umum	5,39	5,78	6,19	6,22	7,81
2. S w a s t a	16,02	16,39	3,86	16,15	18,45

Kontribusi sektor jasa-jasa terhadap PDRB Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu 2005 sampai 2009 nampak fluktuatif. Pada tahun 2005 kontribusinya sebesar 13,18 persen, tahun 2006 sedikit bertambah menjadi 13,33 persen, tahun 2007 berkurang menjadi 12,88 persen dan tahun 2008 sedikit berkurang lagi menjadi 12,97 persen, selanjutnya tahun 2009 kembali bertambah menjadi 13,61 persen. Kontribusi terbesar masih diberikan oleh sub sektor jasa pemerintahan umum 11,96 persen tahun 2008 dan 12,50 persen tahun 2009. Sub sektor jasa swasta hanya mampu memberi kontribusi 1,01 persen tahun 2008 dan 1,11 persen tahun 2009. Meskipun peranannya kecil, namun dalam perkembangannya sub sektor jasa swasta diharapkan akan mampu menjadi faktor penting, terutama sebagai pendukung aktivitas perekonomian dan permintaan domestik yang terus meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat.

Tabel 22
Peranan Sektor Jasa-Jasa terhadap PDRB Sulawesi Tenggara, 2005 - 2009
 (%)

Sub Sektor	2005	2006	2007	2008	2009
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
Jasa-Jasa	13,18	13,33	12,88	12,97	13,61
1. Pemerintahan umum	12,19	12,31	11,92	11,96	12,50
2. S w a s t a	0,99	1,02	0,96	1,01	1,11

Gambar 13
Peranan Sektor Jasa-Jasa terhadap PDRB Sulawesi Tenggara, 2000 dan 2009



Keterangan :

A = Pemerintahan Umum

B = Swasta

C = Sektor Lainnya

4 Lampiran - Lampiran



Ruang Lingkup dan Metode Penghitungan



Istilah Penting



Tabel-Tabel Pokok PDRB

<http://sultra.dns.go.id>

RUANG LINGKUP DAN METODE PENGHITUNGAN

Uraian secara sektoral yang disajikan dalam bab ini mencakup ruang lingkup dan definisi dari masing-masing sektor dan sub sektor, cara-cara perhitungan Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000, beserta sumber datanya.

1. Pertanian

1.1 Tanaman Bahan Makanan

Sub sektor ini mencakup komoditas bahan makanan seperti padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, umbi-umbian, kacang tanah, kacang kedele, kacang-kacangan lainnya, sayur-sayuran, buah-buahan, padi-padian serta bahan makanan lainnya.

1.2. Tanaman Perkebunan

Sub sektor ini mencakup semua jenis tanaman perkebunan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan. Komoditas yang dicakup meliputi antara lain cengkeh, jahe, jambu mete, jarak, kakao, karet, kapas, kapuk, kayu manis, kelapa, kelapa sawit, kemiri, kopi, lada, pala, panili, tebu, tembakau, serta tanaman perkebunan lainnya.

1.3. Peternakan dan Hasilnya

Sub sektor ini mencakup semua kegiatan pembibitan dan budidaya segala jenis ternak dan unggas dengan tujuan untuk dikembangbiakkan, dibesarkan, dipotong dan diambil hasilnya, baik yang dilakukan rakyat maupun oleh perusahaan peternakan. Jenis ternak yang dicakup adalah : sapi, kerbau, kambing, babi, kuda, ayam, itik, telur ayam, telur itik serta hewan peliharaan lainnya.

1.4. Kehutanan

Sub sektor ini mencakup kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan dan akar-akaran, termasuk juga kegiatan perburuan. Komoditas yang dicakup meliputi: kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, arang, bambu, babi hutan, ayam hutan serta hasil hutan lainnya.

1.5. Perikanan

Sub sektor ini mencakup semua kegiatan penangkapan, pembenihan dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar maupun di air asin. Komoditas hasil perikanan antara lain seperti ikan tuna, sunu dan jenis ikan laut lainnya; ikan mas dan jenis ikan darat lainnya; ikan bandeng dan jenis ikan air payau lainnya; udang dan binatang berkulit keras lainnya; cumi-cumi dan binatang lunak lainnya; rumput laut serta tumbuhan laut lainnya.

1.5.1. Jasa Pertanian

Jasa pertanian merupakan jasa-jasa yang diberikan untuk menunjang kegiatan ekonomi pertanian berdasarkan suatu pungutan atau kontrak tertentu. Termasuk dalam jasa pertanian adalah penyewaan alat pertanian dengan operatornya dengan syarat pengelolaan dan resiko usaha tersebut dilakukan secara terpisah. Dalam penghitungan nilai tambah jasa pertanian, secara konsep nilai tambah jasa pertanian ini terdistribusi pada masing-masing sub sektor (misalnya jasa dokter hewan pada sub sektor peternakan, jasa memetik kopi pada sub sektor perkebunan).

1.5.2. Metode Penghitungan Output dan Nilai Tambah

Pendekatan yang digunakan dalam memperkirakan nilai tambah sektor pertanian adalah melalui pendekatan dari sudut produksi. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan tersedianya data produksi dan harga untuk masing-masing komoditas pertanian.

Secara umum, output setiap komoditas diperoleh dari hasil perkalian antara produksi yang dihasilkan dengan harga produsen komoditas bersangkutan. Menurut sifatnya, output dibedakan atas dua jenis yaitu output utama dan output ikutan. Disamping itu perlu diperkirakan tambahan output melalui besaran persentase pelengkap (*mark-up*) yang diperoleh dari berbagai survei khusus. Total output suatu sub sektor merupakan penjumlahan dari nilai output utama dan ikutan dari seluruh komoditas ditambah dengan nilai perlengkapan. Nilai Tambah Bruto (NTB) suatu sub sektor diperoleh dari penjumlahan NTB tiap-tiap komoditas. NTB ini didapat dari pengurangan seluruh biaya-biaya antara dari nilai output atas dasar harga produsen, yang dalam prakteknya biasa dihitung melalui perkalian antara rasio NTB terhadap output komoditas tertentu. Untuk keperluan penyajian data NTB atas dasar harga konstan 2000 ($2000 = 100$), digunakan metode revaluasi, yaitu seluruh produksi dan biaya-biaya antara dinilai berdasarkan harga tahun dasar 2000. Khusus untuk sub sektor peternakan, penghitungan produksinya tidak dapat dilakukan secara langsung, tetapi melalui suatu rumus persamaan yang menggunakan tiga peubah, yakni banyaknya ternak yang dipotong ditambah selisih populasi ternak dan selisih antara ekspor dan impor ternak.

2. Pertambangan dan Penggalian

Seluruh jenis komoditas yang dicakup dalam sektor pertambangan dan penggalian di daerah ini dikelompokkan dalam dua sub sektor, yaitu: pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan tanpa migas dan penggalian.

2.1. Pertambangan tanpa Migas

Petambangan tanpa migas meliputi pengambilan dan persiapan pengolahan lanjutan benda padat, baik di bawah maupun di atas permukaan bumi serta seluruh kegiatan lainnya yang bertujuan untuk memanfaatkan bijih logam dan hasil tambang lainnya. Hasil dari kegiatan ini adalah batubara, bijih nikel dan aspal alam serta komoditas tambang selain tersebut di atas.

Untuk memperoleh output beberapa komoditas tambang seperti bijih nikel dan aspal alam digunakan metode pendekatan produksi. Cara yang digunakan untuk memperoleh output dan NTB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2000 ditempuh cara yang sama dengan cara yang digunakan pada sub sektor pertambangan migas, yaitu revaluasi.

2.2. Penggalian

Sub sektor ini mencakup penggalian dan pengambilan segala jenis barang galian seperti batu-batuan, pasir dan tanah yang pada umumnya berada pada permukaan bumi. Hasil dari kegiatan ini adalah batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu karang, batu marmer, pasir untuk bahan bangunan, pasir silika, pasir kwarsa, kaolin, tanah liat dan komoditas penggalian selain tersebut di atas.

Output komoditas penggalian atas dasar harga konstan 2000 diestimasi melalui pergeseran output tahun 1993 menjadi output tahun 2000, dengan menggunakan perubahan output sektor bangunan atas dasar harga konstan (1993 = 100). Lalu output ini dikalikan dengan rasio NTB terhadap output tahun 2000 sehingga diperoleh NTB atas dasar harga konstan 2000. Output harga berlaku diperoleh setelah output atas dasar harga konstan 2000 dikalikan dengan indeks HPB penggalian (2000 = 100). Selanjutnya untuk memperoleh NTB atas dasar harga berlaku, output ini dikalikan dengan rasio NTB terhadap output pada masing-masing tahun.

3. Industri Pengolahan

Seperti halnya pada seri tahun dasar 1993, industri pengolahan dibedakan atas dua kelompok besar yaitu pertama industri pengolahan minyak dan gas bumi (migas), kedua industri pengolahan tanpa migas. Karena kegiatan industri pengolahan migas dan industri pengolahan minyak bumi belum ada di Sulawesi Tenggara maka selanjutnya akan dijelaskan tentang industri tanpa migas saja.

Sejak tahun 1993 industri pengolahan tanpa migas disajikan menurut dua digit kode Klasifikasi Lapangan Usaha Industri (KLUI) yaitu industri makanan, minuman dan tembakau (31); industri tekstil, pakaian jadi dan kulit (32), industri kayu, bambu dan rotan (33); industri kertas dan barang dari kertas (34); industri kimia dan barang-barang dari kimia dan karet (35); industri barang galian bukan logam (36); industri logam dasar (37); industri barang dari logam, mesin dan peralatannya (38) dan industri pengolahan lainnya.

Didalam perhitungan pada tahun dasar (2000 = 100) digunakan sebagai acuan adalah Tabel Input-Output Indonesia tahun 2000 sehingga semua kode KLUI yang dimulai dengan angka 3 (tiga) sudah dimasukkan dalam sektor industri.

Seperti halnya pada seri tahun dasar 1993, pada industri pengolahan tanpa migas ini juga dibedakan atas tiga bagian yaitu : industri pengolahan tanpa migas besar sedang (tenaga kerja > 19 orang), industri pengolahan tanpa migas kecil (tenaga kerja 5 - 19 orang) dan industri pengolahan tanpa migas kerajinan rumah tangga (tenaga kerja < 5 orang).

Industri Besar dan Sedang

Metode penghitungannya menggunakan pendekatan produksi, yaitu output dihitung lebih dahulu kemudian setelah dikurangi dengan biaya antara diperoleh nilai tambah brutonya. Pada prinsipnya metode estimasi yang digunakan, baik pada seri lama maupun seri baru tidak berbeda yaitu menggunakan cara inflasi untuk menghitung atas dasar harga berlaku dan cara ekstrapolasi untuk menghitung atas dasar harga konstan.

Industri Kecil dan Kerajinan Rumah tangga

Pada prinsipnya cakupan dan definisi kegiatan Industri Kecil dan Kerajinan Rumah tangga (IKKR) sama dengan cakupan dan definisi kegiatan Industri Besar dan Sedang tanpa Migas. Perbedaannya terletak pada jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan industri tersebut. Suatu perusahaan dikatakan sebagai industri kecil jika tenaga kerjanya berjumlah antara 5 sampai 19 orang. Sedangkan perusahaan digolongkan sebagai industri kerajinan rumah tangga jika tenaga kerjanya berjumlah kurang dari lima orang.

Dengan adanya pergeseran tahun dasar 1993 ke 2000, serta penyempurnaan yang berkaitan dengan kelengkapan data pendukung, maka metode penghitungan output dan NTB sub sektor ini diperbaiki dengan menggunakan pendekatan tenaga kerja, yang dihitung secara rinci menurut kegiatan industri yang dikelompokkan dalam dua digit KLUI.

4. Listrik dan Air Bersih

4.1. Listrik

Kegiatan ini mencakup pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik, baik yang diselenggarakan oleh Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) maupun oleh perusahaan Non-PLN seperti pembangkit listrik oleh Perusahaan Pemerintah Daerah dan listrik yang diusahakan oleh swasta (perorangan maupun perusahaan), dengan tujuan untuk dijual. Listrik yang dibangkitkan atau yang diproduksi meliputi listrik yang dijual, dipakai sendiri, hilang dalam transmisi dan listrik yang dicuri.

Metode penghitungan untuk seri 2000 pada sub sektor ini adalah sama dengan metode penghitungan yang dipakai pada seri 1993 yaitu dengan menggunakan pendekatan produksi.

4.2. Air Bersih

Kegiatan sub sektor air bersih mencakup proses pembersihan, pemurnian dan proses kimiawi lainnya untuk menghasilkan air minum, serta pendistribusian dan penyalurannya secara langsung melalui pipa dan alat lain ke rumahtangga, instansi pemerintah maupun swasta.

Metode penghitungan yang digunakan pada seri 2000 ini masih sama dengan metode penghitungan yang digunakan pada seri 1993 yaitu dengan menggunakan pendekatan produksi.

5. Bangunan/Konstruksi

Kegiatan sektor bangunan terdiri dari bermacam-macam kegiatan meliputi pembuatan, pembangunan, pemasangan dan perbaikan (berat maupun ringan) semua jenis konstruksi yang keseluruhan kegiatan sesuai dengan rincian menurut KLUI.

Metode yang digunakan untuk mendapatkan NTB sektor bangunan adalah melalui pendekatan arus barang (*Commodity Flows*). Penggunaan metode ini didasarkan pada pemikiran bahwa besarnya output pada sektor bangunan sejalan dengan besarnya input komoditas yang dipergunakan untuk bangunan. Metode estimasi untuk memperoleh output dan NTB sektor bangunan, menggunakan cara ekstrapolasi yang mana output dan nilai tambah bruto dengan harga konstan harus diperoleh dahulu sebelum memperoleh output dan NTB harga berlaku.

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran

6.1. Perdagangan

Kegiatan yang dicakup dalam sub sektor perdagangan meliputi kegiatan membeli dan menjual barang, baik barang baru maupun bekas, untuk tujuan penyaluran/pendistribusian tanpa mengubah sifat barang tersebut.

Sub sektor perdagangan dalam penghitungannya dikelompokkan ke dalam dua jenis kegiatan yaitu perdagangan besar dan perdagangan eceran. Perdagangan besar meliputi kegiatan pengumpulan dan penjualan kembali barang baru atau bekas oleh pedagang dari produsen atau importir ke pedagang besar lainnya, pedagang eceran, perusahaan dan lembaga yang tidak mencari untung. Sedangkan perdagangan eceran mencakup kegiatan pedagang yang umumnya melayani konsumen perorangan atau rumahtangga tanpa merubah sifat, baik barang baru atau barang bekas.

Metode yang digunakan yaitu metode arus barang. Output atau margin perdagangan merupakan selisih antara nilai jual dan nilai beli barang yang diperdagangkan setelah dikurangi dengan biaya angkut barang dagangan yang dikeluarkan oleh pedagang. Dengan cara metode arus barang, output dihitung berdasarkan margin perdagangan yang timbul akibat memperdagangkan barang-barang dari sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri serta barang-barang yang berasal dari impor. NTB diperoleh berdasarkan perkalian antara total output dengan rasio NTB. Kemudian untuk memperoleh total NTB sub sektor perdagangan adalah dengan menjumlahkan NTB tersebut dengan pajak penjualan dan bea masuk barang impor.

6.2. Hotel

Sub sektor ini mencakup kegiatan penyediaan akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan sebagai tempat penginapan. Yang dimaksud akomodasi disini adalah hotel berbintang maupun tidak berbintang (melati), serta tempat tinggal lainnya yang digunakan untuk menginap seperti losmen, motel dan sejenisnya. Termasuk pula kegiatan penyediaan makanan dan minuman serta penyediaan fasilitas lainnya bagi para tamu yang menginap dimana kegiatan-kegiatan tersebut berada dalam satu kesatuan manajemen dengan penginapan. Alasan penggabungan ini karena datanya sulit dipisahkan.

NTB sub sektor hotel diperoleh dengan menggunakan pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah penghunian malam kamar dan indikator harganya adalah rata-rata tarif per malam kamar. Output atas dasar harga berlaku diperoleh

berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harganya. Sedangkan NTB diperoleh berdasarkan perkalian output dengan rasio NTBnya. Output dan NTB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode ekstrapolasi.

6.3. Restoran

Kegiatan sub sektor restoran mencakup usaha penyediaan makanan dan minuman jadi yang pada umumnya dikonsumsi di tempat penjualan. Kegiatan yang termasuk dalam sub sektor ini seperti rumah makan, warung nasi, warung kopi, katering dan kantin.

Pendekatan yang digunakan untuk menghitung NTB atas dasar harga berlaku dengan pendekatan produksi sedangkan harga konstan dengan cara deflasi dimana IHK makanan sebagai deflatornya.

7. Pengangkutan dan Komunikasi

7.1. Pengangkutan

Kegiatan yang dicakup dalam sub sektor pengangkutan terdiri atas jasa angkutan rel; angkutan jalan raya; angkutan laut; angkutan sungai, danau dan penyeberangan; angkutan udara dan jasa penunjang angkutan. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti terminal, pelabuhan dan pergudangan.

Angkutan Jalan Raya

Meliputi kegiatan pengangkutan barang dan penumpang yang menggunakan alat angkut kendaraan jalan raya, baik bermotor maupun tidak bermotor. Termasuk pula kegiatan charter/sewa kendaraan baik dengan atau tanpa pengemudi.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlakunya merupakan perkalian antara indikator produksi dengan indikator harga untuk masing-masing jenis angkutan. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi. NTB dihitung berdasarkan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Angkutan Laut

Meliputi kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dengan menggunakan kapal laut yang beroperasi di dalam dan ke luar daerah domestik. Tidak termasuk kegiatan pelayaran laut yang diusahakan perusahaan lain yang berbeda dalam satu satuan usaha, dimana kegiatan pelayaran ini sifatnya hanya menunjang kegiatan induknya dan data yang tersedia biasanya sulit untuk dipisahkan.

Pada dasarnya metode estimasi NTB angkutan laut seri tahun dasar 2000 sama dengan tahun dasar 1993. Perbedaan kedua seri tersebut terletak dalam penggunaan rasio NTB. Dalam seri 1993, rasio NTB mencerminkan keadaan tahun 1993 serta merupakan rasio gabungan antara kegiatan angkutan penumpang dan barang. Sedangkan untuk seri 2000, rasio NTB mencerminkan keadaan tahun 2000 dimana rasio NTB untuk kegiatan angkutan penumpang dan barang masing-masing berbeda. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harganya. Output atas dasar harga konstan dihitung dengan metode ekstrapolasi. Sedangkan NTB diperoleh dengan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Kegiatan yang dicakup meliputi pengangkutan barang dan penumpang dengan menggunakan kapal/angkutan sungai dan danau baik bermotor maupun tidak bermotor, serta kegiatan penyeberangan dengan alat angkut kapal ferry.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah penumpang, barang dan mobil yang diangkut. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harga yang terdiri dari angkutan sungai, danau serta penyeberangan. Untuk output atas dasar harga konstan diperoleh dengan metode ekstrapolasi. Sedangkan NTB diperoleh berdasarkan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Angkutan Udara

Kegiatan ini meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan pesawat udara yang diusahakan oleh penerbangan yang beroperasi di Sulawesi Tenggara.

Metode yang digunakan adalah pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah penumpang dan barang yang diangkut. Output atas dasar harga berlaku diperoleh dari perusahaan penerbangan. Sedangkan nilai tambah bruto diperoleh dengan mengalikan rasio NTB dengan outputnya. Output dan NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan metode ekstrapolasi.

Jasa Penunjang Angkutan

Mencakup kegiatan yang bersifat menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan, yaitu meliputi jasa-jasa pelabuhan udara, laut, sungai, darat (terminal dan parkir), bongkar muat laut dan darat, keagenan penumpang ekspedisi laut, jalan tol dan jasa penumpang lainnya seperti pengerukan dan pengujian kelayakan angkutan laut.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output dan NTB atas dasar harga berlaku dari kegiatan yang sifatnya monopoli diperoleh dari pengolahan laporan keuangan BUMN yang terkait. Kegiatan lainnya diperhitungkan dengan mengalikan indikator produksi dan harga. Rasio-rasio yang digunakan adalah rasio NTB, rasio mark-up dan rasio lainnya yang sesuai.

7.2. Komunikasi

Sub sektor ini terdiri dari kegiatan pos dan giro, telekomunikasi dan jasa penunjang komunikasi. Pos dan giro mencakup kegiatan pemberian jasa kepada pihak lain, dalam hal pengiriman surat, wesel dan paket pos yang diusahakan oleh Perum pos dan giro serta perusahaan sejenis. Kegiatan telekomunikasi meliputi pemberian jasa kepada pihak lain, dalam hal ini pengiriman berita melalui telegram, telepon dan telex yang diusahakan oleh PT. Telekomunikasi, PT. Telkomsel dan PT. Indosat. Jasa penunjang komunikasi meliputi kegiatan lainnya yang menunjang komunikasi seperti warung telekomunikasi (wartel), radio panggil (pager), telepon selular (handphone) dan jasa internet.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku berupa pendapatan/penerimaan pos dan giro serta telekomunikasi diperoleh dari laporan keuangan. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh pula dari laporan keuangan berupa penjumlahan upah dan gaji, penyusutan, laba/rugi dan komponen-komponen lainnya dari NTB. Sedangkan output dan NTB atas dasar harga konstan dihitung dengan metode ekstrapolasi.

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

8.1. Bank

Kegiatan yang dicakup adalah kegiatan yang memberikan jasa keuangan pada pihak lain seperti: menerima simpanan terutama dalam bentuk giro dan deposito; memberikan kredit/pinjaman baik jangka pendek/menengah dan panjang; pengiriman uang; membeli dan menjual surat-surat berharga; mendiskonto surat wesel/kertas dagang/surat hutang dan sejenisnya; menyewakan tempat penyimpanan barang berharga dan sebagainya.

Output dari usaha perbankan adalah jumlah penerimaan atas jasa pelayanan bank yang diberikan kepada pemakainya, seperti biaya administrasi atas transaksi dengan bank, biaya pengiriman wesel dan sebagainya. Dalam output bank dimasukkan pula imputasi

jasa bank yang besarnya sama dengan selisih antara bunga yang diterima dengan bunga yang dibayarkan.

8.2. Lembaga Keuangan Tanpa Bank

Usaha Jasa Asuransi

Asuransi adalah salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang usaha pokoknya menanggung risiko atas terjadinya musibah/kecelakaan atas barang atau orang, termasuk tunjangan hari tua. Pihak tertanggung dapat menerima biaya atas hancur/rusaknya barang atau akibat terjadinya kematian mereka. Jasa asuransi ini dapat dibedakan menjadi asuransi jiwa, asuransi sosial serta asuransi kerugian.

Asuransi kerugian adalah usaha perasuransian yang khusus menanggung risiko atas kerugian, kehilangan atau kerusakan harta milik/benda, termasuk juga tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin terjadi terhadap benda/harta milik tertanggung karena sebab-sebab tertentu dengan suatu nilai pertanggungan yang besarnya telah ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak yang dicantumkan dalam surat perjanjian.

Asuransi sosial adalah perasuransian yang mencakup usaha asuransi jiwa (kerugian) yang dibentuk pemerintah berdasarkan peraturan yang menjelaskan hubungan antara pihak asuransi dengan seluruh/segolongan masyarakat untuk tujuan sosial. Pihak asuransi ini akan menerima/menampung sejumlah iuran/sumbangan wajib dari masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan umum, seperti: jasa angkutan, jasa kesehatan, jasa/pelayanan terhadap pemilik kendaraan bermotor dan pelayanan hari tua.

Output dari kegiatan asuransi merupakan rekapitulasi dari output asuransi jiwa, asuransi bukan jiwa seperti: asuransi sosial, asuransi dan reasuransi kerugian serta broker asuransi. Biaya antara yang dikeluarkan dalam kegiatan asuransi berupa biaya umum (seperti pembelian alat tulis kantor, BBM, rekening listrik dan sebagainya), biaya pemeliharaan, sewa gedung dan biaya administrasi.

NTB atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan selisih antara output dan biaya antara yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Sedangkan untuk NTB atas dasar

harga konstan diperoleh dengan cara sebagai berikut: untuk asuransi jiwa menggunakan metode ekstrapolasi dan sebagai ekstrapolatornya adalah jumlah pemegang polis; untuk asuransi sosial menggunakan metode ekstrapolasi dan sebagai ekstrapolatornya adalah jumlah peserta; untuk asuransi kerugian menggunakan metode deflasi dan sebagai deflatornya adalah IHPB umum.

Dana Pensiun

Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola program yang menjanjikan manfaat pensiun. Manfaat pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat pensiun dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Manfaat pensiun terdiri dari manfaat pensiun normal, manfaat pensiun dipercepat, manfaat pensiun cacat dan manfaat pensiun ditunda. Jenis dana pensiun dibedakan menjadi dua yaitu dana pensiun *Pemberi kerja* dan dana pensiun *Lembaga keuangan*

Output dan NTB atas dasar harga berlaku dari kegiatan dana pensiun diperoleh dari hasil pengolahan laporan keuangan kegiatan tersebut. Sedangkan estimasi output dan NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan cara deflasi dimana deflatornya adalah IHK umum dan cara ekstrapolasi dimana ekstrapolatornya adalah jumlah peserta.

Pegadaian

Mencakup usaha lembaga perkreditan pemerintah yang bersifat monopoli dan dibentuk berdasarkan ketentuan undang-undang, yang tugasnya antara lain membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai dengan cara yang mudah, cepat, aman dan hemat. Kegiatan utamanya adalah memberikan pinjaman uang kepada golongan masyarakat dengan menerima jaminan barang bergerak. Besarnya pinjaman sesuai dengan nilai barang jaminan yang diserahkan pihak peminjam tanpa syarat apapun mengenai penggunaan dananya.

Output dan NTB atas dasar harga berlaku dari kegiatan pegadaian diperoleh dari hasil pengolahan laporan keuangan Perum Pegadaian. Outputnya terutama terdiri dari sewa modal, bunga deposito dan lain-lain. NTB diperoleh dengan mengurangi output dengan biaya antara.

Sedangkan output dan NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi dan sebagai ekstrapolatornya adalah jumlah nasabah.

Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang bergerak di sektor keuangan dengan melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana secara langsung dari masyarakat. Lembaga pembiayaan ini mencakup kegiatan sewa guna usaha, modal ventura, anjak piutang, kartu kredit dan pembiayaan konsumen.

Output dan struktur input atas dasar harga berlaku lembaga pembiayaan ini diperoleh dari Direktorat Perbankan dan Usaha Jasa Pembiayaan Departemen Keuangan. Sedangkan output dan NTB atas dasar harga konstan menggunakan metode ekstrapolasi dan sebagai ekstrapolatornya adalah jumlah perusahaan.

8.3. Jasa Penunjang Keuangan

Mencakup kegiatan pedagang valuta asing, reksa dana, biro administrasi efek, tempat penitipan harta dan sejenisnya.

8.4. Sewa Bangunan

Sub sektor ini meliputi usaha persewaan bangunan dan tanah, baik yang menyangkut bangunan tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal seperti perkantoran, pertokoan serta usaha persewaan tanah persil.

Output untuk persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara pengeluaran konsumsi rumahtangga per kapita untuk sewa rumah, kontrak rumah, sewa beli rumah dinas, perkiraan sewa rumah, pajak dan pemeliharaan rumah dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Sedangkan output usaha persewaan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara luas bangunan yang disewakan dengan rata-rata tarif sewa per m². NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan outputnya. NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi dan sebagai ekstrapolatornya indeks luas bangunan.

8.5. Jasa Perusahaan

Jasa Hukum (Advokad/Pengacara, Notaris)

Yang dimaksud dengan *advokad* adalah ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan, baik perkara pidana maupun perdata. Sedangkan *notaris* adalah orang yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh Departemen Kehakiman untuk mensyahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, akte dan sebagainya.

Jasa Akuntansi dan Pembukuan

Jasa *akuntansi dan pembukuan* adalah usaha jasa pengurusan tata buku dan pemeriksaan pembukuan termasuk juga jasa pengolahan data dan tabulasi yang merupakan bagian dari jasa akuntansi dan pembukuan.

Jasa Pengolahan dan Penyajian Data

Jasa *pengolahan dan penyajian data* adalah usaha jasa pengolahan dan penyajian data yang bersifat umum baik secara elektronik komputer maupun manual atas dasar balas

jasa atau kontrak. Termasuk di dalamnya adalah jasa komputer programing dan sebagainya yang ada hubungannya dengan kegiatan perkomputeran.

Jasa Bangunan, Arsitek dan Teknik

Jasa *bangunan, arsitek dan teknik* adalah usaha jasa komunikasi bangunan, jasa survei geologi, penyelidikan tambang/pencarian komoditas pertambangan dan jasa penyelidikan serta sejenisnya.

Jasa Persewaan Mesin dan Peralatan

Jasa *persewaan mesin dan peralatan* adalah usaha persewaan mesin dan peralatannya untuk keperluan pertanian, pertambangan dan ladang minyak, industri pengolahan, konstruksi dan mesin-mesin keperluan kantor.

Output jasa perusahaan diperoleh dari perkalian antara indikator produksi (jumlah perusahaan atau tenaga kerja) dengan indikator harga (rata-rata output perusahaan atau per tenaga kerja).

9. Jasa-Jasa

9.1. Pemerintah Umum dan Pertahanan

Jasa pemerintahan pada prinsipnya terbagi dua yakni pertama pelayanan dari pemerintah departemen dan pertahanan, dan kedua pelayanan yang diberikan oleh badan-badan di bawah departemen tersebut. Pelayanan kedua ini disebut jasa pemerintahan lainnya.

Administrasi, Pemerintahan dan Pertahanan

Sektor pemerintahan umum dan pertahanan mencakup semua departemen dan non departemen, badan/lembaga tinggi negara, kantor-kantor dan badan-badan yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan dan pertahanan.

Belanja pegawai guru pemerintah yang memegang tata usaha dikategorikan sebagai administrasi pemerintah, sedangkan belanja mereka yang tugasnya mengajar dikategorikan sebagai jasa pendidikan. Begitu juga dokter pemerintah yang tidak melayani masyarakat dikelompokkan sebagai administrasi pemerintahan sedangkan yang melayani masyarakat dikelompokkan sebagai jasa kesehatan.

Kegiatan ini meliputi semua tingkat pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang terdiri dari pemerintah daerah tingkat I, tingkat II dan desa termasuk angkatan bersenjata.

Jasa Pemerintahan Lainnya

Jasa pemerintahan lainnya meliputi kegiatan yang bersifat jasa seperti sekolah pemerintah, universitas pemerintah, rumah sakit pemerintah, bimbingan masyarakat terasing, museum, perpustakaan, tempat-tempat rekreasi yang dibiayai dari keuangan pemerintah, dimana pemerintah memungut pembayaran yang pada umumnya tidak mencapai besarnya biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut. Unit-unit usaha semacam ini menyediakan pelayanan jasa untuk masyarakat.

Aparat pemerintah yang melayani penyuluhan KB atau memberi penyuluhan kepada masyarakat terasing dikategorikan sebagai jasa kemasyarakatan lainnya. Sedangkan pegawai pemerintah yang melakukan penjualan karcis masuk taman hiburan, museum atau melayani masyarakat di perpustakaan dikategorikan sebagai jasa hiburan dan kebudayaan.

Belanja pegawai dari sektor ini terdiri dari gaji pokok, honorarium dan tunjangan lainnya. Belanja pegawai yang dipisahkan dari belanja pembangunan ditransfer ke belanja rutin, seperti pembayaran honor pegawai negeri yang turut dalam kegiatan proyek.

Belanja pegawai jasa pemerintahan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, baik rutin maupun pembangunan adalah untuk guru-guru sekolah negeri, pekerja rumah sakit pemerintah, pekerja bimbingan masyarakat terasing, pekerja perpustakaan dan tempat-tempat rekreasi serta museum pemerintah. Penyusutan barang modal untuk sektor pemerintah umum datanya belum tersedia, sehingga nilai penyusutan diestimasi berdasarkan rasio terhadap belanja pegawai. Struktur biaya dari sektor ini tidak memuat unsur surplus usaha. Karena pemerintah tidak melakukan pembayaran pajak tak langsung, maka untuk memperoleh nilai tambah bruto diperkirakan dari penjumlahan belanja pegawai serta perkiraan penyusutan. Data untuk estimasi NTB sektor pemerintah umum didasarkan pada realisasi pengeluaran pemerintah.

Belanja pegawai jasa pemerintah lainnya yang ditransfer dari pemerintah pusat dan daerah diperoleh dari realisasi anggaran belanja pembangunan menurut sektor dan sub sektor. Sedangkan belanja pegawai jasa pemerintahan lainnya untuk pemerintah daerah diperoleh dari belanja pegawai menurut jenis pengeluaran. Disamping belanja pegawai di atas penyusutan juga termasuk dalam penghitungan NTB jasa pemerintahan lainnya, dimana nilai penyusutan diperkirakan sekitar lima persen dari nilai belanja pegawai.

Perkiraan NTB sektor pemerintahan umum dan jasa lainnya atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara ekstrapolasi dengan menggunakan indeks tertimbang jumlah pegawai negeri menurut golongan kepangkatan.

9.2. S w a s t a

Jasa Sosial Kemasyarakatan

Meliputi jasa pendidikan, kesehatan, riset/penelitian, palang merah, panti asuhan, panti atau wreda, yayasan pemeliharaan anak cacat/YPAC, rumah ibadah dan sejenisnya, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta.

Output jasa sosial dan kemasyarakatan diperoleh dari hasil perkalian antara masing-masing indikator produksi seperti jumlah murid menurut jenjang pendidikan, jumlah tempat tidur rumah sakit, jumlah dokter, jumlah anak yang diasuh, jumlah orang lanjut usia yang dirawat, jumlah rumah ibadah, jumlah anak cacat yang dirawat dengan rata-rata output per masing-masing indikator.

Jasa Hiburan dan Rekreasi

Meliputi kegiatan produksi dan distribusi film komersil dan film dokumenter untuk kepentingan pemerintah serta reproduksi film video, jasa bioskop dan panggung hiburan, studio radio, perpustakaan, museum, kebun binatang, gedung olah raga, kolam renang, kelab malam, taman hiburan, lapangan golf, lapangan tenis, bilyar, klub sepak bola, artis film, artis panggung karaoke, video klip, studio televisi dan stasiun pemancar radio yang dikelola swasta.

Output atas dasar harga berlaku diperoleh dengan menggunakan metode pendekatan produksi, yaitu output diperoleh dari hasil perkalian indikator produksi dengan indikator harga. Output kegiatan produksi film diperoleh dari perkalian antara jumlah film yang diproduksi dengan rata-rata output per film. Output kegiatan distribusi film diperoleh dari perkalian antara rasio biaya sewa film dengan output bioskop, sedangkan output bioskop diperoleh dari perkalian antara jumlah penonton dengan rata-rata output per penonton. Output panggung hiburan/kesenian dihitung berdasarkan pajak tontonan yang diterima pemerintah. Output untuk jasa hiburan dan rekreasi lainnya pada umumnya didasarkan pada hasil perkalian antara jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja masing-

masing dengan rata-rata output per indikatornya. Dan NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan output.

Sedangkan output dan NTB atas dasar harga konstan menggunakan metode deflasi/ekstrapolasi dengan deflator/ekstrapolatornya adalah IHK hiburan dan rekreasi atau indeks indikator produksi yang sesuai.

Jasa Perorangan dan Rumahtangga

Meliputi segala jenis kegiatan jasa yang pada umumnya melayani perorangan dan rumahtangga, yang terdiri dari :

- a) Jasa perbengkelan/reparsi kendaraan bermotor, mencakup perbaikan kecil dari kendaraan roda empat, roda tiga dan dua seperti mobil pribadi, mobil umum, bemo, sepeda motor dan sebagainya.
- b) Jasa perbengkelan/reparsi lainnya seperti perbaikan/reparsi jam, televisi, radio, lemari es, mesin jahit, sepeda dan barang rumahtangga lainnya.
- c) Jasa pembantu rumahtangga, mencakup koki, tukang kebun, penjaga malam, pengasuh bayi dan anak dan sejenisnya.
- d) Jasa perorangan lainnya, mencakup tukang binatu, tukang cukur, tukang jahit, tukang semir sepatu dan sejenisnya.

Output atas dasar harga berlaku untuk jasa perbengkelan serta jasa perorangan dan rumahtangga diperoleh dari perkalian antara masing-masing jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. Sedangkan output jasa pembantu rumahtangga, pengasuh bayi dan sejenisnya diperoleh dari perkalian antara pengeluaran per kapita untuk pembantu rumahtangga dengan jumlah penduduk pertengahan tahun untuk jasa perorangan yang belum dicakup.

Dan NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan output, rasio NTB diperoleh dari hasil Survei Khusus Input-Output (SKIO). Sedangkan output dan NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi.

ISTILAH PENTING

Aset (harta) :

Pemilikan atas berbagai macam harta baik berwujud maupun tidak berwujud (*tangible* dan *intangible*) yang dimiliki oleh perorangan, perusahaan ataupun pemerintah. Secara praktis biasanya dinilai dalam bentuk moneter.

Biaya Antara :

Input yang dipergunakan habis dalam proses produksi dan terdiri dari barang tidak tahan lama dan jasa, baik yang dibeli dari pihak lain ataupun yang diproduksi sendiri.

Bunga Neto :

Selisih antara bunga diterima dan bunga yang dibayar atas pinjaman (finansial) yang diberikan..

Ekspor Barang dan Jasa :

Meliputi seluruh transfer dan penjualan barang dan jasa dari residen suatu negara ke residen negara lainnya yang dilakukan baik dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam prakteknya, ekspor terdiri dari barang dagangan dan barang lainnya yang keluar melalui daerah batas pabean atau wilayah domestik suatu negara, termasuk pembelian langsung di negara tersebut oleh perwakilan negara asing dan orang-orang non residen. Karena ekspor barang dagangan suatu negara dinilai atas dasar *fob*, maka nilai ekspor tidak termasuk biaya pengapalan dan asuransi sampai pada negara tujuan.

Faktor Produksi :

Mencakup faktor-faktor yang terlibat dalam suatu proses produksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini terdiri dari tanah, tenaga kerja, modal dan keahlian.

Faktor Pendapatan dari luar :

Merupakan pendapatan/kompensasi yang diterima oleh faktor produksi, atas keterlibatannya dalam suatu proses produksi di luar batas wilayah domestik.

Harga Berlaku :

Penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi, pada harga tahun sedang berjalan.

Harga Konstan :

Penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun dikonsumsi, pada harga tetap satu tahun dasar tertentu.

Impor Barang dan Jasa :

Meliputi seluruh transfer dan pembelian barang dan jasa dari residen suatu negara ke residen negara lainnya dilakukan baik dalam wilayah domestik maupun di luar negeri. Pada prakteknya, impor terdiri dari barang dagangan dan barang lainnya yang melewati batas pabean atau wilayah domestik suatu negara, termasuk pembelian langsung oleh pemerintah, penduduk dan perwakilan negara tersebut di luar negeri. Karena impor barang-barang dagangan dinilai dengan *cif* (*cost*,

insurance and freiht), maka nilai barang termasuk biaya pengangkutan dan asuransi.

Imputasi Jasa :

Merupakan perkiraan atas nilai output jasa yang dihasilkan, sebagai contoh imputasi jasa bank, jasa asuransi, jasa dana pensiun dan sebagainya.

Investasi :

Dana yang disisihkan untuk ditanamkan sebagai modal dalam usaha dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan harapan modal tersebut akan kembali dalam beberapa tahun.

K a p i t a l :

Faktor produksi yang diciptakan oleh keahlian manusia dari sumber alam yang tersedia dan digunakan untuk menciptakan pendapatan seperti : mesin, peralatan, pabrik dan sebagainya yang bersifat barang modal.

Margin Perdagangan dan Biaya Transpor :

Merupakan selisih nilai transaksi pada tingkat harga produsen dengan harga konsumen. Selisih ini mencakup keuntungan pedagang, baik pedagang besar maupun pedagang eceran dan biaya transpor yang timbul dalam menyalurkan barang dari produsen kepada pembeli.

Input Primer :

Disebut juga nilai tambah bruto, terdiri dari balas jasa tenaga kerja, surplus usaha, penyusutan dan pajak tidak langsung neto.

Output Domestik :

Nilai dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi tanpa membedakan pelaku produksinya di wilayah domestik tertentu.

Pajak Tidak Langsung Neto :

Pajak tidak langsung dikurangi subsidi.

Pelengkap (Mark-up) :

Merupakan besaran persentase tertentu yang ditambahkan terhadap suatu bilangan estimasi yang fungsinya untuk melengkapi data yang tidak lengkap.

Pembentukan Modal Tetap :

Meliputi pembentukan dan pembelian barang modal baru baik yang berasal dari dalam negeri maupun impor, termasuk barang modal bekas dari luar negeri. Pembentukan modal tetap yang dicakup hanyalah yang dilakukan oleh sektor-sektor ekonomi di dalam negeri (domestik).

Penyusutan :

Yang dimaksud penyusutan adalah penyusutan barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi.

Permintaan Antara :

Merupakan permintaan barang dan jasa untuk memenuhi proses produksi.

Permintaan Akhir :

Merupakan permintaan barang dan jasa untuk memenuhi konsumsi akhir, pembentukan modal dan ekspor.

Tahun Dasar :

Adalah tahun yang dipilih sebagai referensi statistik dan digunakan sebagai dasar penghitungan tahun-tahun yang lain. Melalui penggunaan tahun dasar tersebut dapat digambarkan series data dengan indikator rinci mengenai perubahan/pergerakan.